

DAMPAK PENENTUAN PENGAKUAN PENDAPATAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

**(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT
BUDI KARYA MANDIRI SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ANITA RETNANINGTYAS
0310323013**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
2007**

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang"

(QS. Ar-Ra'd : 28)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"Experience Is The Best Teacher"



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : DAMPAK PENENTUAN PENGAKUAN PENDAPATAN
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PT BUDI KARYA MANDIRI
SURABAYA)

Disusun oleh : ANITA RETNANINGTYAS

NIM : 0310323013-32

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI BISNIS

Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN

Malang, September 2007

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si

NIP. 131 102 602

Drs. Topowijono, M.Si

NIP. 131 131 030

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : JUM'AT
Tanggal : 28 SEPTEMBER 2007
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : ANITA RETNANINGTYAS
Judul : DAMPAK PENENTUAN PENGAKUAN PENDAPATAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PT BUDI KARYA MANDIRI)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dra. Sri Mangesti Rahayu, M. Si

NIP. 131 102 602

Drs. Topowijono, M. Si

NIP. 131 131 030

Anggota

Anggota

Drs. Nengah Sudjana, M. Si

NIP. 130 873 493

Drs. R. Rustam Hidayat, M. Si

NIP. 131 276 257

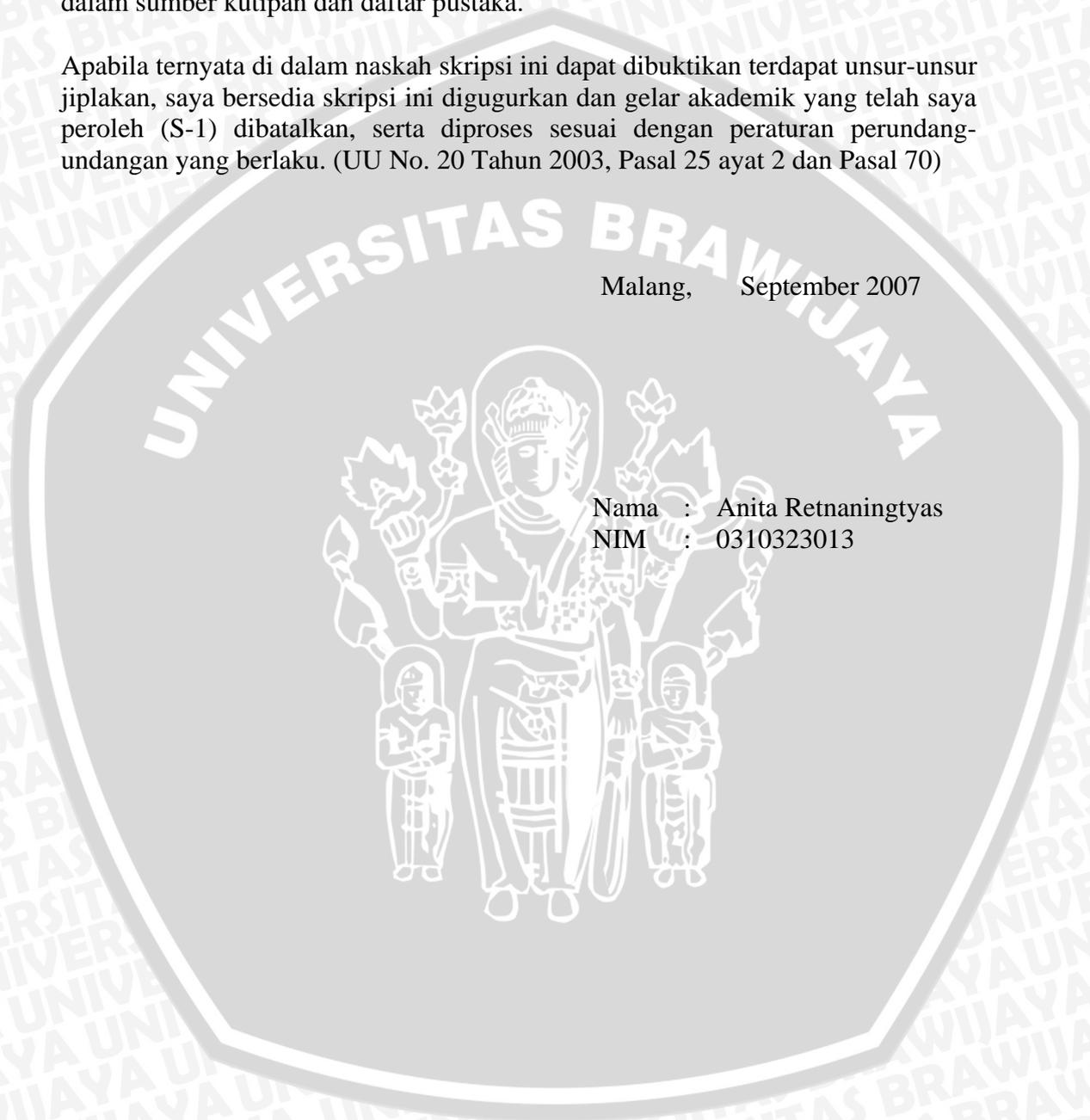
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, September 2007

Nama : Anita Retnaningtyas
NIM : 0310323013



RINGKASAN

Anita Retnaningtyas, 2007, Dampak Penentuan Pengakuan Pendapatan Terhadap Laporan Keuangan (Studi pada PT Budi Karya Mandiri Surabaya), Dra. Sri Mangesti Rahayu, M. Si, Drs. Topowijono, M. Si, 71 Halaman + viii

Saat ini pembangunan di segala bidang menjadi prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kegiatan pembangunan tidak hanya yang bersifat mental spiritual saja, tetapi juga yang bersifat fisik, seperti pembangunan jalan, gedung, dan lain-lain. Dalam melaksanakan pembangunan fisik ini pemerintah membutuhkan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. Ada dua metode yang biasanya dapat digunakan dalam menghitung pengakuan pendapatan, yaitu : (1) Metode Persentase Penyelesaian dan (2) Metode Kontrak Selesai. Dalam metode persentase penyelesaian perhitungan berdasarkan keadaan proyek yang sedang dilaksanakan, dimana persentase diambil dari perbandingan biaya yang telah dikeluarkan atau dari fisik yang sedang berlangsung. Namun pada metode kontrak selesai perhitungan pendapatan dan laba kotor dilakukan pada saat proyek telah selesai dilaksanakan dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Penerapan dari salah satu metode pengakuan pendapatan tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama laporan laba rugi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak pengakuan pendapatan jika menggunakan metode persentase penyelesaian terhadap laporan keuangan perusahaan, dimana sebelumnya perusahaan tersebut masih menerapkan metode yang didasarkan pada termin-termin pembayaran.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan judul, yakni pendapatan proyek, beban proyek, dan nilai proyek. Sedangkan metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik wawancara, yakni dengan manajer proyek dan bagian keuangan, dan teknik pendokumentasian, yakni dengan mendokumentasikan kontrak kerja sama, anggaran biaya pembangunan proyek, dan laporan keuangan perusahaan. Penelitian dilakukan pada PT Budi Karya Mandiri Surabaya.

PT Budi Karya Mandiri merupakan salah satu perusahaan kontraktor yang berada di Surabaya. Salah satu proyek yang ditangani oleh perusahaan ini adalah proyek Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Pada akhir tahun 2006 perusahaan mengakui pendapatannya sebesar 100% dari nilai proyek tersebut. Padahal proyek belum selesai dan baru berakhir pada akhir Januari 2007. Hal ini mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2006 cukup besar, akan tetapi pada saat kontrak berakhir perusahaan menderita kerugian karena tidak ada pendapatan yang diakui dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut cukup besar.

Dengan keadaan yang demikian, maka penulis menerapkan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *Cost to Cost* sebagai pembanding dari metode sebelumnya yang diterapkan perusahaan. Penerapan metode persentase

penyelesaian mengakibatkan perbedaan yang akan tampak pada laporan keuangan, terutama laporan laba / rugi. Laba kotor yang diperoleh perusahaan pada tahun 2006 akan mengalami penurunan karena pendapatan yang diakui perusahaan diperoleh dari persentase biaya yang dikeluarkan dikalikan dengan nilai proyek, dan pada saat proyek selesai perusahaan akan tetap memperoleh laba, dimana dengan metode sebelumnya perusahaan mengalami kerugian.

Dalam membuat dan melaksanakan kontrak kerja sama tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak PT Budi Karya Mandiri, misalnya tidak adanya tata cara pembayaran. Ada baiknya dalam membuat kontrak perjanjian kerja sama kedua belah pihak menyebutkan lebih detail tentang tata cara pembayaran. Selain itu perusahaan sebaiknya menggunakan metode persentase penyelesaian karena dengan metode tersebut perusahaan dapat memperoleh gambaran prestasi kerja dalam menyelesaikan proyek tersebut.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil `Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Penentuan Pengakuan Pendapatan Terhadap Laporan Keuangan” (Studi Kasus Pada PT Budi Karya Mandiri Surabaya) dapat.

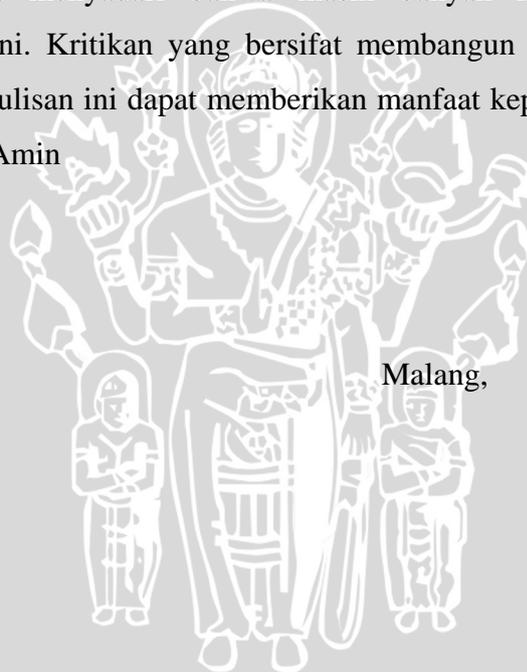
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Kusdi, D.E.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi dukungan serta saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Topowijono, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan saran serta arahan dengan kesabaran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Teguh Setia Budi selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini.
7. Bapak Zainal selaku manajer proyek dan Ibu Inggar selaku manajer keuangan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Kedua orang tuaku tercinta, adik-adikku dan seluruh keluargaku yang selama ini selalu memberikan dukungan, baik material maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para dosen yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan seluruh staf pengajaran Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu penanganan administrasi.
10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2003, *especially* teman-temanku di kelas C, *thank's a lot for your support*. Lebih kurang empat tahun kita bersama, kalian telah memberikan banyak hal bagi penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan dan mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Allahumma Amin



Malang, September 2007

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kontribusi Penelitian	4
E. Sistemetika Pembahasan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontraktor	6
B. Jenis-jenis Kontrak Konstruksi	6
C. Konsep Pendapatan	8
1. Definisi Pendapatan	8
2. Komponen Pendapatan	9
3. Pengukuran Pendapatan	10
4. Pengakuan Waktu Pendapatan	11
D. Beban	14
1. Definisi Beban dan Biaya	14
2. Prinsip Pengakuan Beban	15
E. Metode Pengakuan Pendapatan	16
1. Metode Persentase Penyelesaian	16
2. Metode Kontrak Selesai	17
F. Laporan Keuangan	18
1. Pengertian Laporan Keuangan	18
2. Tujuan Laporan Keuangan	19
3. Jenis Laporan Keuangan	21
4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan	21
5. Penyajian Pengakuan Pendapatan	22

BAB III METODE PENELITIAN

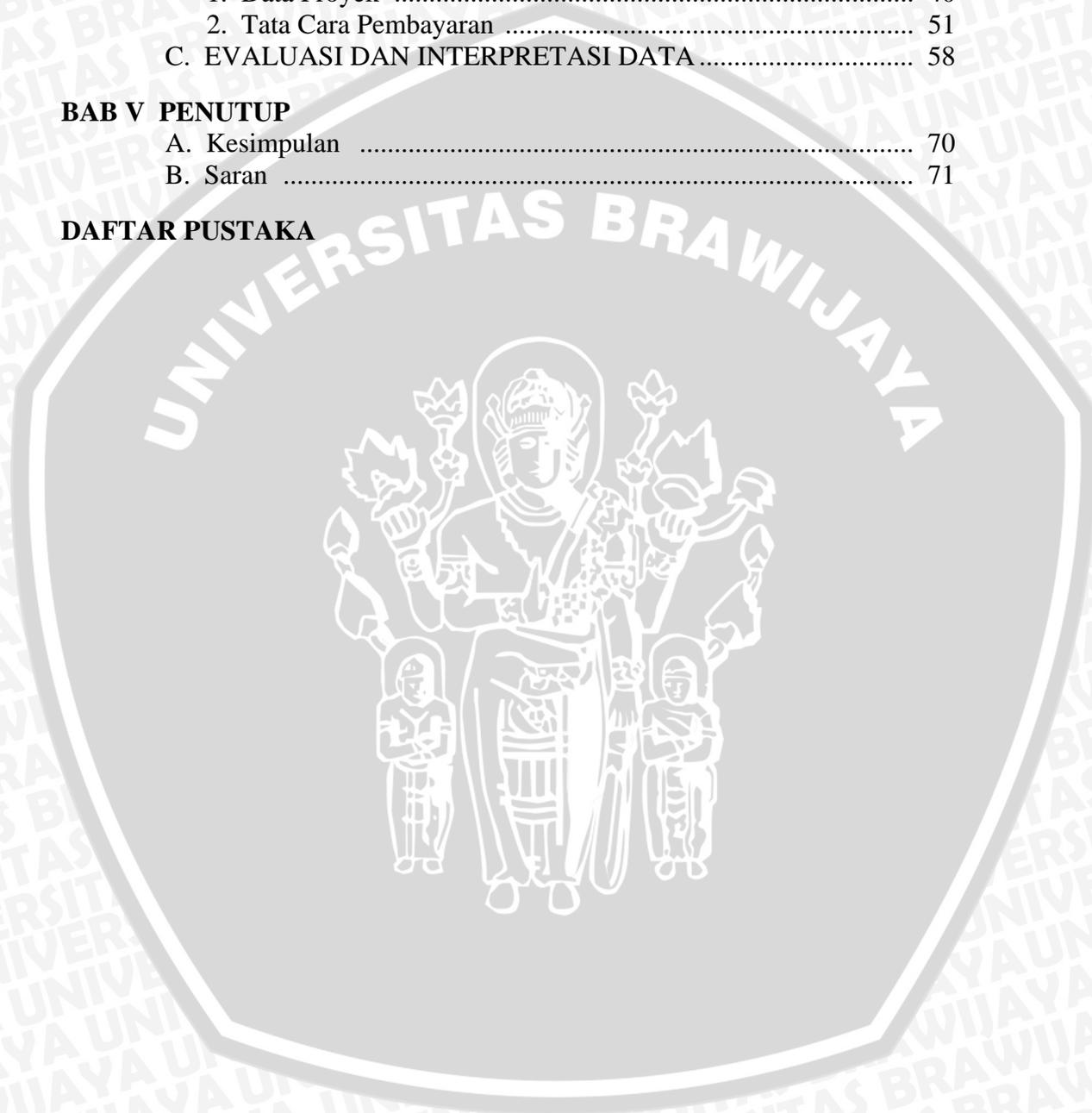
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Instrumen Penelitian	30
G. Analisis Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
------------------------------------	--

1. Sejarah Singkat Perusahaan	32
2. Tujuan Perusahaan	32
3. Struktur Organisasi	34
4. Kebijakan Akuntansi	37
5. Prosedur Perolehan Proyek	39
B. Penyajian Data	
1. Data Proyek	40
2. Tata Cara Pembayaran	51
C. EVALUASI DAN INTERPRETASI DATA	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No.	JUDUL	Hal.
2.1	Laporan Laba Rugi Hardhat Construction Company th. 2001,2002,2003	26
2.2	Neraca Hardhat Construction Company tahun 2001	26
2.3	Neraca Hardhat Construction Company tahun 2002	26
4.1	Neraca PT Budi Karya Mandiri Per 31 Desember 2005	54
4.2	Neraca PT Budi Karya Mandiri Per 31 Desember 2006	55
4.3	Laporan Laba Rugi PT Budi Karya Mandiri tahun 2005	56
4.4	Laporan Laba Rugi PT Budi Karya Mandiri tahun 2006	57
4.5	Laporan Laba Rugi PT Budi Karya Mandiri (dengan menggunakan metode persentase penyelesaian) tahun 2006	65
4.6	Perbandingan Jurnal Untuk Mencatat Proyek Yang Diserahkan dan Harga Pokok Penjualan	67
4.7	Perbandingan Jurnal Untuk Mengakui Pendapatan dan Laba Kotor	68
4.8	Perbandingan Laporan Laba Rugi	69

DAFTAR GAMBAR

No.	JUDUL	Hal.
4.1	Struktur Organisasi PT Budi Karya Mandiri	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pembangunan di segala bidang menjadi prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kegiatan pembangunan tidak hanya ditekankan pada pembangunan yang bersifat mental spiritual saja, seperti pendidikan, agama, dan kebudayaan, tetapi juga dilakukan pembangunan yang bersifat fisik, seperti pembangunan sarana dan pra sarana untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya. Di dalam melaksanakan pembangunan fisik ini pemerintah membutuhkan perusahaan-perusahaan yang ahli di bidang ini, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi.

Pada perusahaan konstruksi atau perusahaan yang operasinya memakan waktu lebih dari satu periode akuntansi, metode pengakuan pendapatannya akan berbeda dengan perusahaan lainnya yang operasinya kurang dari satu periode akuntansi. Ciri-ciri khusus dalam pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi disebabkan oleh : (1) waktu penyelesaian proyek atau pekerjaan tidak selalu jatuh tempo pada akhir periode, (2) kontrak tidak selalu selesai pada satu periode akuntansi, dan (3) setiap pendapatan berkala selalu hanya menggambarkan prestasi kerja yang telah dicapai, sehingga belum dapat menggambarkan pendapatan yang nyata dari pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian.

Pencatatan besarnya pendapatan dalam perusahaan konstruksi tidak selalu dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan, namun ada metode-metode yang digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Ada dua metode yang biasanya dapat digunakan dalam menghitung pengakuan pendapatan, yaitu : (1)Metode Persentase Penyelesaian dan (2) Metode Kontrak Selesai.

Dalam Metode Persentase Penyelesaian perhitungan berdasarkan keadaan pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan, dimana persentase diambil dari perbandingan biaya yang telah dikeluarkan atau dari fisik proyek yang sedang berlangsung. Namun pada Metode Kontrak Selesai perhitungan pendapatan dan

laba kotor dilakukan hanya pada saat proyek telah selesai dilaksanakan dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Ketepatan pemakaian metode pengakuan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu perusahaan, hal ini bila dihubungkan dengan biaya yang terjadi dalam suatu periode. Penerapan salah satu dari kedua metode pengakuan pendapatan di atas akan mengakibatkan perbedaan jumlah pendapatan yang diakui dari tahun ke tahun.

Permasalahan utama dalam akuntansi kontrak perusahaan konstruksi adalah bagaimana pendapatan kontrak dan biaya kontrak dapat dialokasikan pada periode dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan. Untuk mengetahui apakah penerapan yang dipakai perusahaan sudah tepat atau belum tepat, maka harus diperhatikan kondisi perusahaan itu sendiri karena penggunaan yang tepat dari salah satu metode tersebut tergantung pada kondisi perusahaan dan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

Pada perusahaan jasa konstruksi, terdapat hal spesifik di dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi yaitu menentukan kapan pendapatan harus diakui dan kapan harus dilaporkan. Laporan rugi laba merupakan suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari usaha untuk suatu periode tertentu (Baridwan, 1997, h.30). Di dalam laporan rugi laba, pendapatan merupakan elemen penting yang berpengaruh pada penghasilan bersih yang akan diterima perusahaan. Perhitungan penghasilan bersih yang akan diterima oleh perusahaan dapat diketahui dengan mempertemukan dan membandingkan pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi.

Terjadinya pengakuan pendapatan dan beban dalam perusahaan konstruksi merupakan keputusan mendasar sebagai komponen yang ditetapkan dalam menyusun laporan rugi laba. Pendapatan dan beban yang diakui secara tepat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku akan memberikan informasi keuntungan atau kerugian yang handal.

PT Budi Karya Mandiri merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang ada di Kota Surabaya. Dalam pencatatan akuntansi pengakuan pendapatannya, PT Budi Karya Mandiri masih berdasarkan persentase termin pembayaran yang telah

ditetapkan di dalam kontrak yang disepakati sebelumnya. Padahal hal ini dapat menyebabkan terjadinya *understatement* atau *overstatement* dalam penyajiannya dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penulis akan mencoba menganalisis penerapan akuntansi pengakuan pendapatan pada PT Budi Karya Mandiri dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Hal ini disebabkan karena metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang.

Dengan diterapkannya metode persentase penyelesaian ini, maka akan berdampak pada beberapa rekening akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan, baik laporan laba rugi maupun neraca. Rekening-rekening dalam laporan laba rugi yang akan terkena dampak tersebut antara lain pendapatan, beban, dan laba kotor, sedangkan rekening-rekening dalam neraca adalah piutang dan persediaan. Akan tetapi besar kecilnya dampak yang disebabkan oleh penerapan metode persentase penyelesaian ini akan menggambarkan keadaan laporan keuangan sesungguhnya sesuai dengan kemajuan proyek.

Berkaitan dengan uraian di atas dan mengingat pentingnya penerapan pengakuan pendapatan yang tepat pada perusahaan, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan yang tepat dalam praktek, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Penentuan Pengakuan Pendapatan Terhadap Laporan Keuangan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT Budi Karya Mandiri?
2. Bagaimana dampak pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT Budi Karya Mandiri terhadap laporan keuangan?
3. Bagaimana penerapan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian jika diterapkan pada PT Budi Karya Mandiri?
4. Bagaimana dampak pengakuan pendapatan dengan menggunakan persentase penyelesaian jika diterapkan pada PT Budi Karya Mandiri terhadap laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT Budi Karya Mandiri.
2. Untuk mengetahui dampak pengakuan pendapatan yang diterapkan PT Budi Karya Mandiri terhadap laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian pada PT Budi Karya Mandiri.
4. Untuk mengetahui dampak penerapan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian terhadap laporan keuangan pada PT Budi Karya Mandiri.

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Akademis

Aspek akademis dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengetahui praktek-praktek yang sesungguhnya dihadapi dan sampai sejauh mana teori-teori yang diperoleh selama ini dapat diterapkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan.

- b. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan pengetahuan dan informasi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian serupa yang berkenaan dengan analisis penentuan pengakuan pendapatan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan atau pertimbangan bagi perusahaan di dalam mengakui pendapatan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas dalam rancangan penelitian ini, maka akan diuraikan sistematika pembahasan dari skripsi yang akan disusun secara garis besar sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang penulisan. Selanjutnya

merumuskan masalah yang menjadi pokok penelitian dari uraian sub bab latar belakang sebelumnya dan yang terakhir menetapkan tujuan dari penulis skripsi, serta kontribusi penelitian baik dari segi akademis maupun aspek praktis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang telah dicetuskan oleh pakar-pakar yang menjadi dasar pembahasan pokok permasalahan yang tertuang pada bab IV.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang definisi metode penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan dan bagaimana pengolahan data yang digunakan oleh penulis, fokus penelitian, dan juga teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pokok dari bab ini adalah pengolahan data yang didapat oleh penulis yang meliputi penyajian data, pembahasan, dan pemecahan masalah.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan dalam bab IV. Kemudian penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi perusahaan.

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontraktor

Dilihat dari konsep hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dinyatakan bahwa:

“Perusahaan jasa konstruksi adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorang atau badan usaha yang melakukan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.”

Ditinjau dari konsep akuntansi, Ikatan Akuntansi Indonesia (2004, h.34.1) dalam SAK No.34 disebutkan bahwa “Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok.”

Sedangkan Soeharto (2001, h.21) menyatakan bahwa :

“Tugas dan kewajiban kontraktor dalam kontrak EPK (Engineering Proyek Konstruksi) adalah bertanggung jawab atas implementasi proyek. Adapun lingkup kerjanya meliputi desain engineering, pembelian dan konstruksi, termasuk memantau dan inspeksi proses pabrikasi peralatan yang dipesan dari manufaktur atau pabrik.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa kontraktor merupakan badan usaha yang dalam kegiatan operasionalnya melakukan pembangunan, pembuatan, perbaikan atau pemugaran suatu aset atau kombinasi aset yang saling berhubungan satu sama lain, di mana sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut dinegosiasikan secara khusus. Aset tersebut berupa barang tidak bergerak seperti gedung, jalan, bendungan, ataupun perumahan. Sedangkan konstruksi yang berhubungan erat dengan rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan dan penggunaan pokok, kontrak seperti ini biasanya untuk konstruksi kilang-kilang minyak atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan.

B. Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, ada dua jenis kontrak konstruksi, yaitu kontrak harga tetap (*lump-sum*) dan kontrak harga tidak tetap

(*cost-plus*), seperti yang disebutkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.34.1) sebagai berikut:

1. Kontrak Harga Tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya.
2. Kontrak Biaya-Plus adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap.

Pada kontrak harga tetap, pihak kontraktor setuju untuk melaksanakan semua pekerjaan proyek yang dicantumkan dalam kontrak dengan imbalan uang (harga) yang jumlahnya tetap. Kontraktor menanggung semua resiko kemungkinan kenaikan biaya yang tidak dapat diduga atau diramalkan selain proyek berlangsung. Kenaikan biaya dapat berasal dari kenaikan harga material keperluan proyek, kenaikan gaji atau keadaan cuaca yang tidak mendukung. Sebaliknya kontraktor akan menikmati keuntungan sepenuhnya bila pengeluaran proyek kurang dari harga yang tercantum dalam kontrak.

Selanjutnya menurut Soeharto (2001, h.14), kontrak harga tetap dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Harga Tetap dengan Eskalasi
Di sini terdapat ketentuan bahwa harga kontrak dapat disesuaikan, naik atau turun, yang didasarkan atas suatu indeks eskalasi yang disetujui bersama.
2. Harga Tetap dengan Perangsang
Dalam Hal ini kontraktor akan mendapat tambahan biaya yang telah disetujui formulanya sebagai perangsang. Misalnya bila kontraktor dapat menyelesaikan proyek lebih awal dari rencana.
3. Kontrak dengan Satuan Harga Tetap
Kontrak ini sering dijumpai dalam keadaan bilamana jenis pekerjaan dan spesifikasinya dapat secara jelas ditentukan, sedangkan jumlah atau besarnya pekerjaan belum dapat diketahui secara tepat. Misalkan pada pekerjaan pembuatan jalan raya di mana untuk kontrak ini dapat disusun berdasarkan harga satuan per kubik tanah yang dipindahkan, per meter kubik aspal yang harus dikerjakan.

Pada biaya plus menurut Soehato (2001, h.15) adalah pihak pemilik membayar semua biaya (jasa dan material) yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek yang diatur dalam kontrak ditambah dengan sejumlah uang dalam bentuk upah (*fee*). Di pihak lain kontraktor berjanji mengadakan usaha sebaik-baiknya

untuk melaksanakan proyek sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Kontrak ini memberikan keluwesan yang sangat besar bagi pemilik karena dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dan tidak perlu dilakukan, menyetujui atau menolak harga yang telah diajukan kontraktor dalam pembelian barang tertentu. Dalam hal ini pemilik menanggung resiko seluruhnya atau beban biaya proyek, termasuk hal-hal yang belum diketahui sewaktu penandatanganan kontrak, misalnya perubahan nilai tukar, inflasi, dan lain-lain. Adapun variasi dalam kontrak jasa ini menurut Soeharto (2001, h.15) adalah sebagai berikut:

1. Harga Tidak Tetap dengan Upah Tetap
Pemilik membayar kembali semua biaya proyek yang dikeluarkan oleh kontraktor, ditambah *fee* yang jumlahnya tetap.
2. Harga Tidak Tetap dengan Suatu Batas Maksimum
Pemilik membayar kembali semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk merampungkan proyek ditambah upah sampai pada suatu batas maksimum. Pengeluaran di atas batas maksimum menjadi tanggungan kontraktor.
3. Harga Tidak Tetap dengan Resiko Ditanggung Bersama
Di sini jumlah upah akan naik sesuai dengan penghematan yang dihasilkan, tetapi akan mendapat hukuman denda sesuai dengan jumlah kelebihan biaya yang terjadi di atas sasaran.
4. Harga Tidak Tetap dengan Upah Berubah-Ubah
Bila pada akhir proyek ternyata biaya proyek yang sesungguhnya berada di bawah sasaran, maka jumlah upah akan naik dan demikian pula sebaliknya. Tetapi di sini kontraktor tidak dikenakan hukuman karena pemilik akan membayar semua biaya proyek.

C. Konsep Pendapatan

Berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu tentang pengakuan pendapatan, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai konsep pendapatan yang meliputi definisi pendapatan, komponen pendapatan, pengukuran pendapatan dan pengakuan waktu pendapatan.

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan meliputi semua sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa-jasa kepada pihak lain. Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.23.2) mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Berdasarkan pengertian di atas bahwa pendapatan hanya terdiri dari manfaat ekonomi yang diterima dan

dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti Pajak Pertambahan Nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas.

Selanjutnya, Baridwan (1997, h.10) mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Istilah pendapatan di sini merupakan suatu istilah yang luas, di mana yang termasuk dalam pendapatan yakni pendapatan bunga, sewa, laba penjualan, aktiva, dan lain-lain. Batasan umum yang biasa digunakan adalah semua perubahan dalam jumlah bersih aktiva selain yang berasal dari pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt (2002, h.3) pendapatan adalah:

“ Arus masuk semua aktiva dan penyelesaian kewajiban serta penyerahan produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan aktivitas utama secara berkesinambungan selama suatu periode. Pendapatan untuk suatu periode umumnya ditentukan tersendiri terlepas dari beban dengan menerapkan prinsip pengakuan pendapatan.”

Pendapatan itu sendiri akan terhimpun atau terbentuk dengan adanya keseluruhan kegiatan perusahaan atau dengan adanya totalitas usaha perusahaan. Sedangkan pendapatan dapat direalisasikan atau diwujudkan dengan adanya perubahan bentuk produk menjadi kas atau aktiva lainnya yang sah.

2. Komponen Pendapatan

FASB (*Financial Accounting Standards Board*) dalam FASC (*Statements of Financial Accounting Concepts*) No. 3 (Hendriksen, 2000, h.379) menjelaskan bahwa pendapatan terjadi (dari) operasi hutang dan operasi pusat perusahaan yang berkesinambungan selama satu periode.

Tetapi menurut Suwardjono (1986, h.80) tambahan nilai aktiva perusahaan yang tidak termasuk komponen pendapatan berasal dari :

- a. Transaksi modal (pembelanjaan) yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham
- b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan merupakan barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga atau penjualan anak atau cabang perusahaan
- c. Hadiah, sumbangan, atau penemuan
- d. Revaluasi harta
- e. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran hasil penjualan produk

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.34.3) menyebutkan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari:

- a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; dan
 - b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klain, dan pembayaran intensif:
 - 1) Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan
 - 2) Dapat diukur secara handal.
3. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidakpastian yang tergantung pada hasil peristiwa di masa yang akan datang. Estimasinya seringkali harus direvisi sesuai dengan realisasi dari hilangnya ketidakpastian.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.23.4) bahwa :

“Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Sedangkan bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Hendriksen (2000, h.380) bahwa nilai tukar produk atau jasa perusahaan merupakan ukuran terbaik bagi pendapatan. Nilai tukar ini menunjukkan ekuivalen kas atau nilai sekarang dari pendiskontoan tagihan uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan.

Namun pendiskontoan tersebut dapat diabaikan apabila waktu menunggunya singkat karena tiga alasan berikut (Hendriksen, 2000, h.381) :

- a. Dengan tingkat diskonto yang rendah, maka jumlah diskonto akan kecil dan tidak mempengaruhi total penilaian pendapatan secara material
- b. Karena bunga diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, maka pengaruh utama berasal dari pengaruh waktu. Jika jumlah bunga tidak material, maka masukannya dalam pendapatan penjual akan berpengaruh kecil terhadap total pendapatan untuk periode itu
- c. Klasifikasi pendapatan yang timbul dari saat penantian (bunga) akan hilang dan dimasukkan dalam klasifikasi pendapatan yang berasal dari penjualan produk dan jasa.

4. Pengakuan Waktu Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.34.6) bahwa “bila hasil (*outcome*) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca.”

Sedangkan bila hasil kontrak tidak dapat diestimasi secara andal (IAI, 2004, h.34.8), maka:

- a. Pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat dipulihkan (*recoverable*); dan
- b. Biaya kontrak harus diakui sebagai beban dalam periode terjadinya.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.23.1) menyatakan ada tiga jenis pendapatan yang harus diketahui penentuan waktu pengakuannya, yaitu:

- a. Penjualan barang;
- b. Penjualan jasa; dan
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan deviden

Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt (2002, h.5), penentuan waktu pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan
 - b. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan
 - c. Pengakuan pendapatan sesudah penyerahan
 - d. Pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus
- a. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan

FASB dalam *Concept Statement* No. 5 (Kieso dan Weygandt, 2002, h.6) ada dua syarat (sedang direalisasikan atau dapat direalisasikan dan sedang dihasilkan) untuk mengakui pendapatan biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa-jasa diberikan pada langganan.

Menurut Hendriksen (2000, h.388) alasan-alasan pelaporan pendapatan pada saat penjualan adalah sebagai berikut:

- 1) Harga produk sekarang sudah lebih pasti
- 2) Produk telah berada di luar perusahaan dan aktiva baru sudah menggantikannya, yaitu pertukaran telah terjadi

- 3) Untuk sebagian besar perusahaan, penjualan diasumsikan sebagai peristiwa keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi perusahaan
- 4) Sebagian besar biaya yang menyangkut pembuatan atau perolehan produk dan biaya pelepasan sekarang telah ditentukan
- 5) Selanjutnya pengakuan pendapatan dari transaksi penjualan dapat diakui pada saat penjualan terjadi.

Dari alasan-alasan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan pada saat penjualan harus dilakukan pada saat yang bersamaan dengan terjadinya penjualan karena pada waktu terjadi transaksi telah terjadi pertukaran kewajiban antara penjual dan pembeli; di mana penjual telah menyerahkan barang, sedangkan pembeli melaksanakan kewajibannya dengan membayar tunai ataupun kredit.

b. Pengakuan Pendapatan Sebelum Penyerahan

Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan biasanya digunakan untuk kontrak-kontrak pembangunan jangka panjang dan pendapatan diakui berdasarkan persentase penyelesaian dalam pekerjaan pembangunan walaupun belum terjadi serah terima. Dengan cara ini pendapatan dapat diakui dalam periode-periode dimana pekerjaan pembangunan dalam pengerjaan dan tidak perlu menunggu sampai seluruh pekerjaan selesai dan dilakukan serah terima.

Dua metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang menurut Kieso dan Weygandt (2002, h.9), yaitu:

- 1) Metode Persentase Penyelesaian
Dalam metode ini laba diakui secara periodik atas dasar persentase pekerjaan yang terselesaikan. Hal ini dimungkinkan bila taksiran biaya untuk menyelesaikan kontrak dan tahap kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Metode Kontrak Selesai
Metode ini sesuai dengan konsep realisasi karena pendapatan baru diakui pada saat kontrak telah selesai, namun hal ini berarti bahwa selama periode pelaksanaan kontrak tidak ada pengakuan terhadap hasil atau terhadap kemajuan dalam penyelesaian kontrak.

Pengakuan pendapatan selama produksi (Hendriksen, 2000, h.386) adalah bahwa total harga kontrak ditentukan di muka atau dapat ditentukan. Jadi ketidakpastian harga jual akan diminimalisasi, dan ketidakpastian penagihan biasanya tidak terlalu besar, terutama jika pembeli adalah instansi pemerintah atau suatu perusahaan yang mapan.

Adakalanya pendapatan tertentu diakui pada saat penyelesaian produk meskipun tidak ada penjualan yang dilakukan. Biasanya hal ini digunakan untuk komoditas perak dan emas.

c. Pengakuan Pendapatan Sesudah Penyerahan

Penagihan harga pokok penjualan tidak dapat dipastikan secara layak dan pengakuan pendapatan biasanya ditangguhkan. Dua metode yang biasa dipakai, yaitu:

- 1) Metode Cicilan (*Installment Method*)
- 2) Metode Pemulihan Kembali Harga (*Cost Recovery Method*)

Menurut Kieso dan Weygandt (2002, h.20) metode cicilan lebih menekankan penagihan daripada penjualan. Metode ini mengakui laba pada saat periode penagihan atau bukannya pada saat penjualan. Baik pendapatan maupun biaya-biaya penjualan diakui pada periode penjualan tetapi laba kotor yang berkaitan ditangguhkan pada saat periode penagihan kas.

Jadi bukan penjualan yang ditangguhkan pada periode penagihan yang diantisipasi di masa datang dan kemudian biaya-biaya serta beban yang berkaitan ditangguhkan, akan tetapi hanya laba kotor yang ditangguhkan, yang setara dengan penundaan penjualan dan Harga Pokok Penjualan, sedangkan beban-beban lainnya tidak ditangguhkan.

Dalam metode pemulihan kembali biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang dagangan yang telah dijual dan sesudah semua kas dipulihkan kembali, setiap tambahan kas yang ditagihkan dimasukkan sebagai penghasilan.

d. Pendapatan Untuk Transaksi Penjualan Khusus

Pendapatan penjualan yang masuk dalam kategori transaksi khusus, yaitu *franchise* (waralaba) dan konsinyasi. Dalam akuntansi untuk penjualan *franchise* (Kieso dan Weygandt, 2002, h.35) yang harus dilakukan adalah menganalisa suatu transaksi dan mempertimbangkan segala situasi serta harus menggunakan pertimbangan dalam hal pemilihan dan menerapkan satu atau lebih dasar pengakuan pendapatan dan memantau situasi selama periode waktu yang panjang.

Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt (2002, h.35), penjualan konsinyasi adalah metode khusus untuk memasarkan jenis produk tertentu dengan

penyerahan barang dari pabrik (atau pedagang grosir) kepada dealer (atau pengecer) sebagai pelaksana sepenuhnya dan sebagai penjualan karena pabrik masih memegang hak atas barang tersebut.

D. Beban

1. Definisi Beban dan Biaya

Untuk memahami makna dari istilah beban (*expense*), maka istilah tersebut harus dipisahkan atau dibedakan dengan istilah biaya. Menurut Supriyono (1991, h.185) istilah “biaya didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomi yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh organisasi.” Sedangkan beban (*expense*) menurut Supriyono (1991, h.186) “beban adalah biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan (*revenue*) dalam suatu periode akuntansi tertentu.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membahas masalah pendapatan tentunya tidak bisa terlepas dari masalah beban. Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.1.18) paragraf 70 point b memberikan pengertian beban (*expense*) sebagai berikut, “Beban (*expense*) adalah penerunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam membentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

Sementara Tuanakota (2000, h.164) memberikan definisi beban (*expense*) sebagai berikut “Beban (*expense*) dapat diartikan sebagai pemakaian barang dan jasa dalam mendapatkan pendapatan (*revenue*).”

Dari kedua definisi di atas tentang beban (*expense*) tersirat pengertian bahwa adanya pemakaian barang dan jasa dalam operasional perusahaan guna memperoleh pendapatan, sehingga mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk arus kas keluar. Jadi nilai dari barang dan jasa akan menjadi habis apabila produk tersebut telah ditransfer kepada pembeli.

Mengenai biaya pada kontrak konstruksi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.34.5) menyebutkan bahwa:

“Biaya suatu kontrak konstruksi terdiri dari:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut; dan

- c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak”

Adapun biaya proyek itu sendiri dibedakan atas biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Nugraha (1985, h.65) memberikan batasan tentang kedua biaya tersebut sebagai berikut:

“Biaya langsung adalah biaya yang langsung berhubungan dengan konstruksi atau bangunan, seperti bahan baku, upah buruh, dan biaya peralatan. Sedangkan biaya tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut, seperti halnya biaya overhead, biaya tak terduga, dan biaya keuntungan atau profit.”

2. Prinsip Pengakuan Beban

Beban merupakan habisnya potensi suatu sumber daya untuk memberikan jasa bagi kegiatan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau yang ditujukan untuk memperoleh laba (Fisher dkk, 1989, h.17). Mutu pelaporan keuangan akan meningkat jika beban dibedakan dari kerugian (*loss*). Kerugian merupakan pengurangan modal yang berasal dari transaksi-transaksi yang bukan merupakan kegiatan utama perusahaan. Beban atau transaksi-transaksi yang bersifat insidental ini tidak mencakup distribusi kepada atau penarikan modal dari pemilik.

Berdasarkan sifat beban itu sendiri, beberapa prinsip pengakuan beban mempengaruhi penentuan laba bersih satuan usaha. Prinsip-prinsip ini merupakan kerangka dasar bagi pengakuan beban dan mengakui kesulitan-kesulitan praktek yang dihadapi dalam penandingan pendapatan dan beban secara teoritis. Ada beberapa prinsip pengakuan beban menurut Fisher dkk (1989, h.17), yaitu:

- a. Menghubungkan Sebab Akibat
Beberapa biaya (*cost*) diakui sebagai beban (*expense*) berdasarkan asumsi adanya hubungan langsung dengan pendapatan tertentu.
- b. Alokasi Sistematis dan Rasional
Jika tidak ada cara menghubungkan secara langsung antara sebab akibat, maka beberapa jenis biaya dihubungkan dengan periode akuntansi tertentu untuk diakui sebagai beban dalam rangka usaha untuk mengalokasikan biaya secara sistematis dan rasional. Diantara berbagai periode itu manfaat akan diberikan.
- c. Pengakuan Langsung
Beberapa jenis biaya dianggap beban dalam periode akuntansi berjalan karena biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut tidak memiliki manfaat yang jelas di masa depan. Biaya yang dicatat sebagai aktiva dalam periode sebelumnya tidak lagi menunjukkan adanya manfaat yang jelas

atau pengalokasian biaya entah dengan cara menghubungkan dengan pendapatan atau dengan membaginya diantara beberapa periode akuntansi.

E. Metode Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Kontraktor

Proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan kontraktor mempunyai jangka waktu yang bervariasi, yaitu jangka pendek (proyek yang pengerjaannya kurang dari satu periode akuntansi) dan proyek jangka panjang (proyek yang proses pengerjaannya lebih dari satu periode akuntansi). Sebagian proyek dapat dikerjakan dalam jangka waktu kurang dari satu periode akuntansi, sementara setiap tahun periode akuntansi, keberhasilan manajemen perlu dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Ada dua metode akuntansi untuk pendapatan atas kontrak jangka panjang, yaitu Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage of Completion Method*) dan Metode Kontrak Selesai (*Completed Contract Method*).

1. Metode Persentase Penyelesaian

Penggunaan metode ini dalam suatu perusahaan kontraktor terikat pada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi, yaitu: (Smith dan Skousen, 2004, h.587)

- a. Estimasi yang dapat diandalkan dapat dibuat atas pendapatan kontrak, biaya kontrak, dan sejauh mana kemajuan ke arah penyelesaian
- b. Kontrak dengan jelas menyebutkan hak yang dapat dilaksanakan mengenai barang atau jasa yang dapat disediakan dan diterima oleh kedua belah pihak, pertimbangan untuk menukar, dan sifat serta persyaratan penyelesaian
- c. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak
- d. Kontraktor dapat diharapkan untuk melakukan kewajiban kontrak.

Selanjutnya Smith dan Skousen (2004, h.587) menyebutkan bahwa ada beberapa metode yang sekarang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu kontrak. Metode-metode itu dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

a. Ukuran Masukan

Ukuran masukan dibuat sehubungan dengan usaha-usaha yang dicurahkan untuk suatu kontrak. Ukuran ini didasarkan pada suatu hubungan yang nyata antara unit masukan dan produktivitas. Dalam ukuran ini terdapat dua metode, yaitu:

1) Metode biaya ke biaya (*Cost to Cost Method*)

Metode *Cost to Cost* mengukur persentase yang diselesaikan dengan rasio biaya yang terjadi pada tanggal tertentu terhadap estimasi terbaru dari total

biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase penyelesaian} = \frac{\text{Total biaya yang terjadi pada tanggal tertentu}}{\text{Estimasi terbaru dari total biaya proyek}}$$

Estimasi terbaru dari total biaya proyek adalah penjumlahan total biaya yang terjadi pada tanggal tertentu ditambah estimasi biaya yang akan terjadi untuk menyelesaikan proyek. Jika persentase penyelesaian telah dihitung, jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan ditentukan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Periode berjalan} = \left[\begin{array}{cc} \text{Persentase} & \text{Total} \\ & \text{Pendapatan} \\ \text{Penyelesaian} & \text{kontrak} \end{array} \right] \text{Total pendapatan - periode sebelumnya}$$

2) Metode Usaha yang dicurahkan

Metode ini didasarkan pada ukuran tertentu dari pekerjaan yang dilaksanakan. Ukuran itu meliputi jam kerja, upah buruh, jam mesin, atau kuantitas bahan. Dalam hal-hal tersebut tingkat penyelesaian diukur dengan cara yang sama dengan yang digunakan dengan metode *Cost to Cost*, yaitu rasio usaha yang telah dicurahkan terhadap taksiran seluruh usaha yang akan diarahkan untuk menyelesaikan kontrak.

b. Ukuran Hasil

Ukuran hasil dibuat dengan hasil yang dicapai. Termasuk kategori ini adalah metode yang didasarkan pada unit yang dihasilkan dan penambahan nilai (*Value Added*). Contohnya : jika kontrak menghendaki unit hasil, seperti panjang jalan raya, maka ukuran penyelesaiannya adalah rasio dari panjang jalan yang sudah diselesaikan terhadap panjang jalan dalam kontrak. Taksiran dari pekerjaan yang telah dihasilkan tersebut biasanya dilakukan oleh arsitek maupun insinyur dalam suatu proyek.

Kebaikan dari metode persentase penyelesaian adalah bermanfaat dalam penentuan laba rugi secara berkala sejalan dengan tingkat penyelesaiannya, serta dapat mencerminkan biaya-biaya yang masih diperlukan untuk penyelesaian sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah terletak pada keharusan untuk menaksir biaya keseluruhannya dan menaksir tingkat penyelesaian pekerjaan, sehingga perhitungan laba rugi dipengaruhi unsur-unsur ketidakpastian.

2. Metode Kontrak Selesai

Pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai pada prinsipnya sama dengan pengakuan pendapatan setelah produksi selesai. Dalam hal ini pendapatan ini diakui dan dilaporkan hanya jika suatu kontrak telah selesai dikerjakan. Dalam kondisi yang demikian, dalam suatu periode tidak ada pencatatan atas laba rugi kontrak pada periode yang bersangkutan. Sebagai

akibatnya biaya-biaya yang terjadi pada periode tersebut diakumulasi. Seperti yang disebutkan oleh Kieso dan Weygandt (2002, h.14) bahwa:

“Menurut kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor diakui hanya jika terjadi penjualan, artinya pada saat kontrak selesai. Biaya-biaya kontrak jangka panjang dalam pelaksanaan dan penagihan lancar diakumulasikan, tetapi tidak ada pembebanan sementara atau kredit ke perkiraan perhitungan laba rugi untuk pendapatan, biaya-biaya, atau laba kotor.”

Metode kontrak selesai digunakan bila perusahaan terutama mempunyai kontrak-kontrak jangka pendek dan atau apabila kondisi-kondisi untuk menggunakan akuntansi persentase penyelesaian tidak terpenuhi, atau apabila ada ketidakpastian yang melekat dalam kontrak di luar risiko usaha normal.

Keuntungan utama dari metode kontrak selesai adalah pelaporan pendapatan didasarkan pada hasil akhir dan bukan pada taksiran pekerjaan yang belum dilakukan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat mencerminkan prestasi kerja masa berjalan bila periode kontrak tersebut diperpanjang menjadi lebih dari satu periode akuntansi. Meskipun pelaksanaannya mungkin cukup seragam selama periode kontrak tersebut, namun pendapatan yang tidak dilaporkan sampai tahun penyelesaiannya akan menimbulkan penyimpangan dalam laba.

F. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Baridwan (1997, h.17) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain, yaitu laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Selanjutnya, Kieso dan Weygandt (1995, h.6) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak luar.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan diantara para ahli tersebut, namun pada intinya laporan keuangan mempunyai maksud yang sama, yaitu laporan

keuangan merupakan ringkasan proses pencatatan yang disajikan untuk memberikan informasi kepada pihak luar tentang keadaan keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan ekonomis.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan diinformasikan kepada pihak-pihak luar perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.1.2) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Secara garis besar tujuan laporan keuangan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum menurut Baridwan (1997, h.4) dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- 4) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman.
- 5) Untuk mengungkap sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.

b. Tujuan Kualitatif

Karakter kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Baridwan (1997, h.5) mengungkapkan bahwa laporan keuangan akan bermanfaat apabila memenuhi tujuh kualitas, yaitu:

- 1) Relevan
Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Sehubungan dengan tujuan relevansi, seyogyanya dipilih metode-metode pengukuran dan pelaporan akuntansi yang akan membantu para pemakai dalam pengambilan jenis-jenis keputusan.
- 2) Dapat Dimengerti
Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.
- 3) Daya Uji
Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia di dalam proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses tersebut tidak lagi berlandaskan pada realita objektif semata. Dengan demikian untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
- 4) Netral
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan para pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.
- 5) Tepat Waktu
Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- 6) Daya Banding
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan lainnya pada periode yang sama.
- 7) Lengkap
Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif di atas.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.1.7), tujuan kualitatif tersebut lebih ditekankan ke dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi:

1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai dengan asumsi pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Informasi dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Adanya pelbagai alternatif praktek akuntansi dewasi ini menyulitkan tercapainya daya banding antar perusahaan, oleh sebab itu penekanan harus dilakukan pada tercapainya daya banding antar periode dalam satu perusahaan dengan menerapkan prinsip kontinuitas, yaitu metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

3. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang sering digunakan menurut Kieso dan Weygandt (1995, h.6) adalah neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, pengungkapan dalam catatan merupakan bagian yang terpadu dari masing-masing keempat laporan keuangan dasar ini. Sedangkan Baridwan (1997, h.18), laporan keuangan yang disusun manajemen biasanya terdiri dari :

- a. Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
- b. Laporan Rugi Laba, laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi
- c. Laporan Perubahan Modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode.
- d. Laporan Perubahan Posisi Keuangan, menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.

4. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar. Menurut karakteristik ekonominya kelompok besar ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.1.13) menyatakan unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- b. Kewajiban merupakan hutang perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.1.18), unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan rugi laba adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan (*income*), adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- b. Beban (*expense*), adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam membentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Keuntungan tersebut mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

5. Penyajian Pengakuan Pendapatan Dalam Laporan Keuangan

Dalam perusahaan jasa konstruksi terdapat perbedaan jelas antara pengaruh pendapatan dan laba dari penggunaan metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diberikan contoh perhitungan pendapatan dan laba antara metode persentase penyelesaian dengan metode kontrak selesai seperti yang dikutip dari Kieso dan Weygandt (2002, h.11-15) :

Hardhat Construction Company memiliki kontrak yang dimulai pada bulan Juli 2001, untuk membangun sebuah jembatan senilai \$4,500,000 yang diharapkan selesai pada bulan Oktober 2003, dengan estimasi biaya sebesar

\$4,000,000. Pada akhir tahun 2002 estimasi total biaya telah meningkat menjadi \$4,050,000. Data berikut ini berkaitan dengan periode konstruksi tersebut:

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Biaya sampai saat ini	\$1,000,000	\$2,916,000	\$4,050,000
Estimasi biaya untuk menyelesaikan	\$3,000,000	\$1,134,000	-
Termin selama tahun berjalan	\$900,000	\$2,400,000	\$1,200,000
Kas yang tertagih selama tahun berjalan	\$750,000	\$1,750,000	\$2,000,000

Dari data di atas, persentase penyelesaian dapat dihitung sebagai berikut:

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Harga kontrak	<u>\$4,500,000</u>	<u>\$4,500,000</u>	<u>\$4,500,000</u>
Dikurangi estimasi biaya:			
Biaya sampai tanggal ini	\$1,000,000	\$2,916,000	\$4,050,000
Estimasi biaya untuk penyelesaian	<u>\$3,000,000</u>	<u>\$1,134,000</u>	<u>-</u>
Estimasi total biaya	<u>(\$4,000,000)</u>	<u>(\$4,050,000)</u>	<u>(\$4,050,000)</u>
Estimasi total laba kotor	\$500,000	\$450,000	\$450,000
Persentase penyelesaian	25%	72%	100%

Berdasarkan data di atas, ayat jurnal akan dibuat untuk mencatat biaya konstruksi, termin, dan hasil penagihan. Ayat jurnal ini dibuat sebagai ikhtisar berbagai transaksi yang terjadi selama tahun berjalan:

Tahun 2001

Konstruksi dalam proses	\$1000,000	
Kas		\$1,000,000
(Mencatat biaya konstruksi)		
Piutang usaha	\$900,000	
Penagihan atas konstruksi dalam proses		\$900,000
(Mencatat termin)		
Kas	\$750,000	
Piutang usaha		\$750,000
(Mencatat hasil penagihan)		

Tahun 2002

Konstruksi dalam proses	\$1,916,000	
Kas		\$1,916,000
(Mencatat biaya konstruksi)		
Piutang usaha	\$2,400,000	
Penagihan atas konstruksi dalam proses		\$2,400,000
(Mencatat termin)		
Kas	\$1,750,000	
Piutang usaha		\$1,750,000
(Mencatat hasil penagihan)		

Tahun 2003

Konstruksi dalam proses	\$1,134,000	
Kas		\$1,134,000
(Mencatat biaya konstruksi)		
Piutang usaha	\$1,200,000	
Penagihan atas konstruksi dalam proses		\$1,200,000
(Mencatat termin)		
Kas	\$2,000,000	
Piutang usaha		\$2,000,000
(Mencatat hasil penagihan)		

Estimasi pendapatan dan laba kotor yang akan diakui untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang diakui pada tahun 2001 adalah:

$$\$4,500,000 \times 25\% = \$1,125,000$$

Sedangkan laba kotor yang diakui adalah:

$$\$500,000 \times 25\% = \$125,000$$

- b. Pendapatan yang diakui pada tahun 2002 adalah:

$$(\$4,500,000 \times 72\%) - \$1,125,000 = \$2,115,000$$

Sedangkan laba kotor yang diakui adalah:

$$(\$450,000 \times 72\%) - \$125,000 = \$199,000$$

c. Pendapatan yang diakui pada tahun 2003 adalah:

$$(\$4,500,000 \times 100\%) - (\$1,125,000 + \$2,115,000) = \$1,260,000$$

Sedangkan laba kotor yang diakui adalah:

$$(\$450,000 \times 100\%) - (\$125,000 + \$199,000) = \$126,000$$

Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan serta laba kotor setiap tahun dan untuk mencatat penyelesaian serta persetujuan akhir atas kontrak tersebut diperlihatkan sebagai berikut:

Tahun 2001

Konstruksi dalam proses (laba kotor)	\$125,000
Beban konstruksi	\$1,000,000
Pendapatan kontrak jangka panjang	\$1,125,000
(Mengakui pendapatan dan laba kotor)	

Tahun 2002

Konstruksi dalam proses (laba kotor)	\$199,000
Beban konstruksi	\$1,916,000
Pendapatan kontrak jangka panjang	\$2,115,000
(Mengakui pendapatan dan laba kotor)	

Tahun 2003

Konstruksi dalam proses (laba kotor)	\$126,000
Beban konstruksi	\$1,134,000
Pendapatan kontrak jangka panjang	\$1,260,000
(Mengakui pendapatan dan laba kotor)	
Penagihan atas konstruksi dalam proses	\$4,500,000
Konstruksi dalam proses	\$4,500,000
(Mencatat penyelesaian kontrak)	

Penyajianya dalam Laporan Laba Rugi dan Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
HARDHAT CONSTRUCTION COMPANY
Laporan Laba Rugi
Th. 2001, 2002, 2003

	2001	2002	2003
Pendapatan Kontrak Jangka Panjang	\$1,125,000	\$2,115,000	\$1,260,000
Biaya Konstruksi	<u>(\$1,000,000)</u>	<u>(\$1,916,000)</u>	<u>(\$1,134,000)</u>
Laba Kotor	\$ 125,000	\$ 199,000	\$ 126,000

Tabel 2.2
HARDHAT CONSTRUCTION COMPANY
Neraca
Tahun 2001

Aktiva Lancar:	
Piutang Usaha	\$150,000
Persediaan:	
Konstruksi dalam proses	\$1,125,000
(-) Tagihan atas kontrak	<u>(\$ 900,000)</u>
Kelebihan konstruksi dalam proses atas tagihan	\$225,000

Tabel 2.3
HARDHAT CONSTRUCTION COMPANY
Neraca
Tahun 2002

Aktiva lancar :	
Piutang Usaha	\$800,000
Kewajiban Lancar:	
Kelebihan tagihan atas konstruksi dalam proses	\$ 60,000

Bab III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu kegiatan dapat dikatakan suatu penelitian apabila kegiatan tersebut menelaah suatu permasalahan, dimana cara yang dipergunakan untuk menghasilkan atau menemukan penemuan baru yang objektif mengenai alam atau dunia sosial dengan metode ilmiah secara terancang dan sistematis.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995, h.8), penelitian merupakan suatu proses panjang. Ia berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.

Menurut Nazir (2005, h.14-15), penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian secara terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi dengan setepat mungkin. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai kejadian-kejadian seperti apa adanya, jadi hanya mengungkapkan fakta.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995, h.4) menyatakan bahwa penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek sosial tertentu dan yang kedua adalah untuk mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Sedangkan menurut Nazir (2005, h.63) penelitian deskriptif didefinisikan sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Menurut Nazir (2005, h.66) penelitian studi kasus didefinisikan sebagai berikut:

“Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan satu hal yang bersifat umum.”

Sedangkan pengertian studi kasus menurut Arikunto (2002, h.129) penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari studi kasus ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antara variabel-variabel yang ada dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

B. Fokus Penelitian

Sebelum melakukan suatu penelitian terlebih dahulu haruslah menentukan fokus penelitian. Menurut Maleong (2006, h.237) fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan, yaitu membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, tempat penelitian menjadi layak dan menetapkan kriteria, inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Adanya fokus penelitian dapat menghasilkan informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sehubungan dengan judul penelitian, maka fokus yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan proyek

Jumlah pendapatan proyek adalah besarnya penghasilan yang harus diakui dalam suatu periode. Pendapatan ini akan dihitung sesuai dengan metode yang dipakai oleh perusahaan. Pendapatan diukur dari nilai rupiah penghasilan yang diterima perusahaan sesuai dengan metode yang dipakai oleh perusahaan.

2. Beban Proyek

Beban proyek adalah beban yang benar-benar dikeluarkan untuk kepentingan proyek pada periode yang bersangkutan. Nilai beban ini diukur dari besarnya jumlah yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak.

3. Nilai Kontrak

Nilai kontrak adalah besarnya harga yang telah disepakati antara kontraktor dengan pelanggan. Nilai kontrak ini diukur dari nilai rupiah yang diterima perusahaan sesuai dengan pekerjaan dalam kontrak.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Subagyo (1991, h.35), lokasi penelitian merupakan lokasi atau objek penelitian yang sesuai dengan objek permasalahannya dan merupakan daerah informasi secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi pada PT Budi Karya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Babadan Rukun VII / 12 Surabaya. PT Budi Karya Mandiri bergerak dalam bidang jasa konstruksi.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana terdapat informasi atau data yang dibutuhkan. Menurut Arikunto (2002, h.114) sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ditinjau dari asalnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Menurut Marzuki (1989, h.55-56) kedua macam data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini dapat diperoleh secara langsung dari hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan bagian pelaksana proyek dan bagian administrasi proyek.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder ini diperoleh dengan cara dokumentasi dan mengumpulkan data dengan mempelajari dan menggunakan data yang sudah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini

penulis mengumpulkan data berupa data proyek, surat perjanjian kontrak, surat penawaran, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Arikunto (2002, h.147) adalah suatu cara untuk memperoleh data didalam kegiatan penelitian. Sehubungan dengan pengumpulan data penelitian, untuk mencatat data yang lengkap dan akurat, baik data primer maupun data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang menangani kontrak suatu proyek perusahaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2002, h.149) adalah kegiatan di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk menyelidiki kontrak perjanjian kerja sama, rekapitulasi anggaran biaya proyek dan laporan keuangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam penelitian. Arikunto (2002, h.308) mengemukakan bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan, antara lain tentang sejarah perusahaan, bidang jenis usaha, dan proses memperoleh kontrak.
2. Pedoman pendokumentasian, alat yang digunakan adalah alat tulis menulis dan fotokopi yang bertujuan untuk mendapatkan data (dokumentasi) perusahaan.

G. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari keadaan dalam kejadian yang diteliti, maka data yang terkumpul perlu dianalisis. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh yang berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan pada perusahaan kontraktor dan kemudian menguraikan atau mendeskripsikannya menurut teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.

Analisis data tersebut akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan beserta penyajiannya dalam laporan keuangan.
2. Mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam pengakuan pendapatan perusahaan tersebut.
3. Mencoba melakukan penerapan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *cost to cost*.
4. Menyajikan hasil perhitungan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian (pendekatan *cost to cost*) dalam laporan keuangan.
5. Membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan berdasarkan metode persentase penyelesaian.

Dalam skripsi ini langsung digunakan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *cost to cost* untuk menyelesaikan masalah karena alasan-alasan yang telah disebutkan pada tinjauan pustaka.

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam skripsi ini akan disajikan bagaimana pendapatan tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan, dalam hal ini yakni neraca dan laporan laba rugi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pertama kali berdiri pada tanggal 14 September 1994, PT Budi Karya Mandiri masih berbentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV. Budi Karya Mandiri. CV. Budi Karya Mandiri ini terletak di Jalan Babadan Rukun VII / 12 Surabaya. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Teguh Setia Budi, Ibu Inggarwati Liauw, dan Ibu Indriati Iskak.

Sejak tanggal 7 Oktober 2004 CV. Budi Karya Mandiri berubah menjadi Perseroan Terbatas yang dipimpin oleh Bapak Teguh Setia Budi. Perubahan dan pengesahan bentuk badan usaha ini dilakukan di hadapan notaris, yakni Bapak Wachid Hasyim, SH yang terletak di Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya. Akta perubahan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No. C-04370 HT.01.01. TH.2005 tertanggal 21 Februari 2005.

Pada awal berdirinya PT Budi Karya Mandiri bergerak dalam beberapa bidang usaha, antara lain dalam bidang konstruksi baik sebagai perencana maupun pelaksana, bidang percetakan, dan pada bidang pengadaan alat-alat tulis, alat kantor dan perlengkapan pegawai. Akan tetapi sejak tahun 2005 PT Budi Karya Mandiri hanya bergerak dalam bidang konstruksi saja.

2. Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Tujuan perusahaan biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Demikian halnya dengan PT Budi Karya Mandiri ini dalam melakukan usahanya mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

a. Tujuan Jangka Pendek

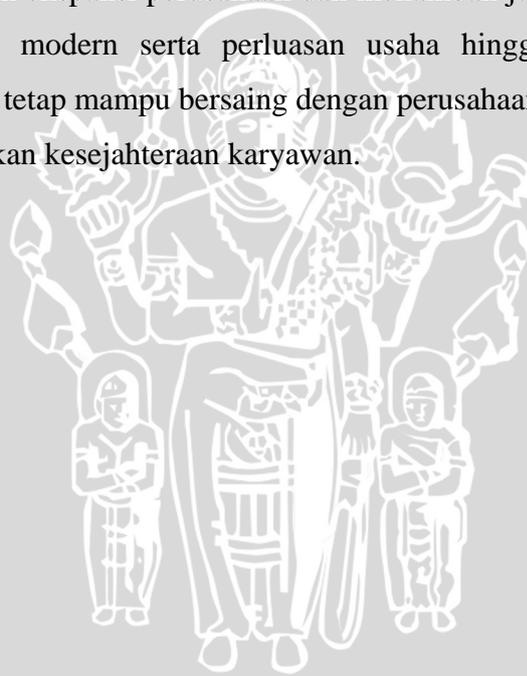
Yang dimaksud tujuan jangka pendek adalah tujuan yang hendak dicapai perusahaan dalam waktu relatif singkat yang pada umumnya berkisar antara satu tahun, antara lain:

- 1) Memenuhi kelancaran dalam pengoperasian pekerjaan secara efisien dan dalam kondisi yang tepat
- 2) Berusaha memenuhi selera konsumen
- 3) Berusaha memenuhi efektifitas penggunaan fasilitas agar usaha berkembang lebih efisien

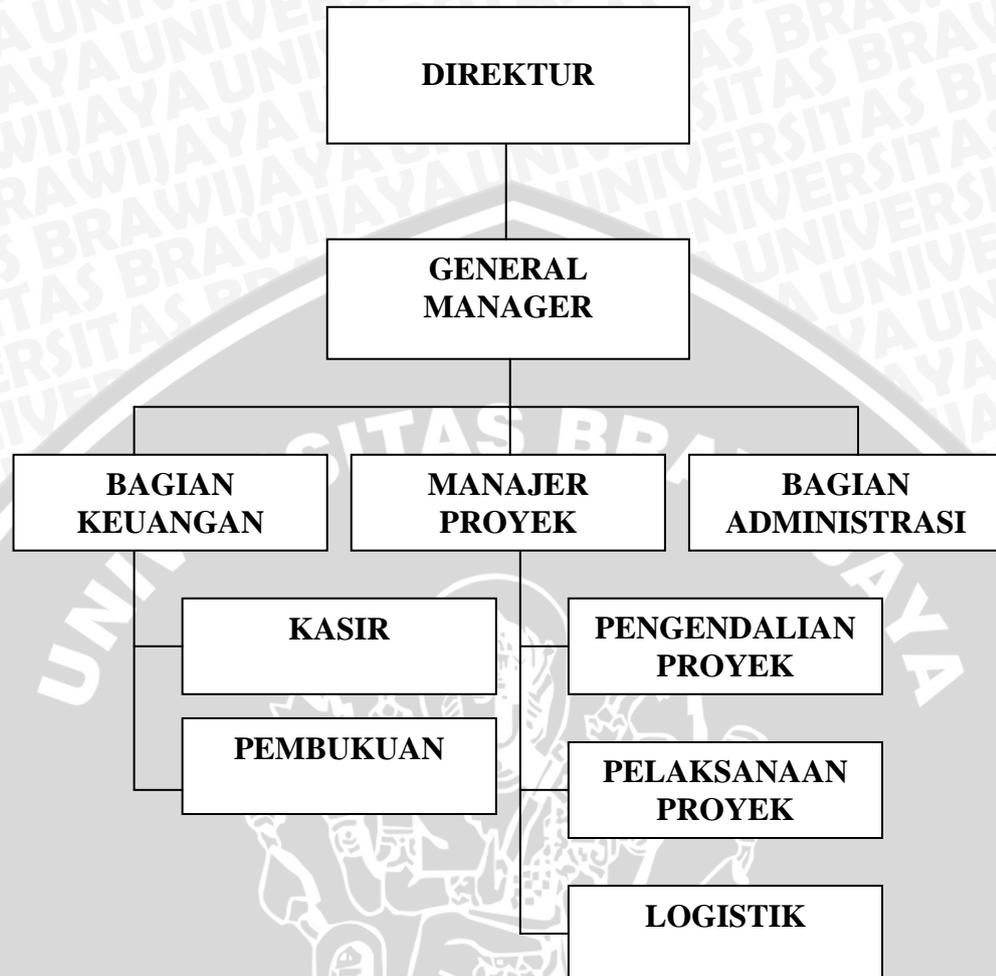
b. Tujuan Jangka Panjang

Seperti yang telah dijelaskan pada tujuan jangka pendek, bahwa tujuan jangka panjang merupakan kelanjutan dari usaha-usaha pencapaian tujuan perusahaan yang dapat tercapai setelah tujuan jangka pendek tercapai, antara lain:

- 1) Meningkatkan profit perusahaan
- 2) Mengadakan ekspansi perusahaan dan menambah jumlah mesin-mesin yang lebih modern serta perluasan usaha hingga memungkinkan perusahaan tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis
- 3) Meningkatkan kesejahteraan karyawan.



3. Struktur Organisasi



Sumber : PT Budi Karya Mandiri

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Direktur Utama

- 1) Merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi segala sesuatu yang ada di perusahaan dalam hubungannya dengan pihak luar.
- 2) Menjaga kondisi kerja yang menyenangkan, menanamkan disiplin kerja bawahan dan berkomunikasi dengan para karyawan, baik horizontal maupun vertikal.
- 3) Memperhatikan dan menghargai kepentingan karyawan dan bawahan.
- 4) Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap maju mundurnya perusahaan.

b. General Manager

- 1) Menjaga kontinuitas usaha dengan berusaha menjaga agar posisi keuangan tetap baik.
- 2) Meningkatkan rentabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan efisiensi, yaitu usaha perusahaan dengan menekan biaya serendah mungkin tanpa merubah atau mempengaruhi standar kualitas yang telah dicapai.

c. Bagian Administrasi

- 1) Pendataan masalah kesekretariatan (agenda dan ekspedisi surat-menyurat).
- 2) Pendataan masalah humas dan kepegawaian.
- 3) Pembuatan perlengkapan tender.
- 4) Pembuatan surat-surat setelah termin (jadwal) turun sampai keluar uang dari KPKPN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara).
- 5) Perhitungan uang makan dan gaji bulanan.

d. Bagian Keuangan

- 1) Bagian Kasir
 - a) Memegang kas kecil maupun umum
 - b) Menampung dan memeriksa kebenaran semua kegiatan dana yang masuk ke bagian kasir.
 - c) Membayar dana yang telah mendapat persetujuan dari dewan direksi.
 - d) Membuat voucher / faktur pembayaran dana yang telah dikeluarkan dan memasukkan dana tersebut ke program komputer keuangan dan mendistribusikan ke bagian pembukuan.
 - e) Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 - f) Mengarsipkan data keuangan.
- 2) Bagian Pembukuan
 - a) Menerima dan memeriksa laporan keuangan

- b) Memeriksa kebenaran dan keabsahan data yang dikirim oleh keuangan proyek serta memasukkan data tersebut ke dalam program keuangan proyek.
 - c) Mengumpulkan, mencari dukomen keuangan dari semua bagian.
 - d) Memasukkan data tersebut ke dalam program komputer keuangan setiap ada transaksi.
 - e) Membuat jurnal penyesuaian dan jurnal memorial per akhir bulan.
 - f) Mencetak laporan otorisasi proyek, laporan pengeluaran uang, laporan biaya serta laporan neraca dan rugi laba, bulanan dan tahunan untuk dilaporkan ke Dewan Direksi dan bagian pajak.
 - g) Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- e. Manajer Proyek
- 1) Menjalankan disiplin bidang teknik dalam merencanakan program dan penganggaran.
 - 2) Melaksanakan program proyek di bidang perencanaan, penyesuaian, penganggaran dan pengawasan mutu.
 - 3) Menyiapkan perlengkapan administrasi yang akan dikerjakan oleh pelaksana lapangan.
 - 4) Mengolah program yang telah ditetapkan.
 - 5) Menjalankan kewajiban pimpinan sehubungan isi kontrak dan melaksanakan proyek tersebut dalam bidang teknis.
 - 6) Mengikuti rapat proyek yang diadakan dan dipimpin oleh pimpinan.
- Dalam melaksanakan tugasnya manajer proyek dibantu oleh:
- 1) Bagian Pengendalian Proyek
 - a) Memantau pelaksanaan secara fisik dan administratif.
 - b) Mengevaluasi hasil pemantauan dan diterangkan dalam bentuk grafik atau diagram pada schedule pelaksanaan.
 - c) Melapor kepada direktur perusahaan atas evaluasi tugas-tugasnya.
 - 2) Bagian Pelaksanaan Proyek
 - a) Menguasai bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
 - b) Menguasai cara dan sasaran harian dan program yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan melaporkan realisasinya.

- c) Menguasai perseyaratan mutu dan cara mencapainya serta mempertahankan mutu pekerjaan.
 - d) Melaksanakan, mengawasi dan menggerakkan tenaga, alat atau penanggung jawab borongan untuk mengerjakan pekerjaan dalam lingkup kerjanya.
 - e) Menerima dan memakai bahan bangunan atau operasi yang telah dijatah.
 - f) Melaksanakan administrasi teknik dan membuat catatan lengkap dalam buku harian.
 - g) Bertanggung jawab atas kebenaran pengisian buku harian peralatan.
 - h) Bekerjasama dengan petugas-petugas pengendalian untuk mewujudkan pencatatan realisasi prestasi pekerjaan.
 - i) Mengadakan dan memimpin rapat pengarahan untuk setiap pekerjaan yang akan dimulai.
 - j) Melaporkan kepada pimpinan bila melihat kejadian yang menjurus pada kerugian pelanggan.
 - k) Mengikuti rapat pengarahan yang diadakan dan dipimpin oleh pimpinan setiap minggu.
- 3) Bagian Logistik Proyek
- a) Mencari dan mengadakan semua jenis material sesuai dengan aspek teknis yang diperlukan.
 - b) Menyimpan dan menjaga bahan bangunan atau operasi peralatan.
 - c) Menyalurkan bahan-bahan bangunan peralatan ke tempat pekerjaan dalam lingkup kerjanya.
 - d) Mengadinistrasikan dan menyusun pertanggungjawaban bahan bangunan dan dan pemakaiannya.
 - e) Mengikuti rapat pengarahan yang diadakan dan dipimpin oleh pimpinan setiap minggu.

4. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan:

a. Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung (*indirect method*). Kas diartikan sebagai kas dan setara kas yang terdiri atas kas, bank, dan deposito uang penempatannya tidak lebih dari tiga bulan.

b. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat sebesar nilai nominal. Perseroan tidak membentuk cadangan kerugian atas piutang usaha yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih dihapuskan secara langsung. Piutang usaha ini merupakan piutang termin atas pendapatan yang belum diterima perusahaan.

c. Proyek Dalam Penyelesaian

Proyek dalam penyelesaian merupakan pekerjaan yang masih dalam tahap pembangunan atau penyelesaian dan dicatat berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

d. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dibukukan berdasarkan harga perolehan (harga beli), ditambah biaya-biaya dalam rangka menempatkan aktiva tetap pada kondisi siap pakai. Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan yang jumlahnya relatif kecil, akan dibebankan ke rugi laba, sedangkan yang jumlahnya cukup material akan dibebankan kepada aktiva tetap yang bersangkutan. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*). Penggolongan dan persentase penyusutan sebagai berikut:

Jenis Aktiva Tetap	% Penyusutan per Tahun
Bangunan	10%
Peralatan dan Mesin	25%
Kendaraan	25%
Inventaris	25%

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak (*percentage of completion*).

f. Manfaat Karyawan

Perseroan belum mengakui manfaat karyawan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2003. Tidak ada dana yang disisihkan sehubungan dengan kewajiban tersebut.

g. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Pada tanggal 23 Desember 1997, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 46, yakni Akuntansi Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 1999 untuk perusahaan terbuka dan 1 Januari 2001 untuk perusahaan tertutup. Menurut PSAK No. 46 antara lain pengakuan dan pengukuran atas aktiva pajak tangguhan (deferred tax liabilities) atas dampak pajak di masa yang akan datang dari kejadian-kejadian di laporan keuangan, termasuk saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi. Jumlah yang diakibatkan dari penerapan PSAK baru tersebut atas laporan keuangan umum belum ditentukan oleh perusahaan.

5. Prosedur Perolehan Proyek

Perusahaan konstruksi dalam memperoleh proyek biasanya melalui berbagai tahap-tahap yang biasanya disyaratkan oleh pemberi proyek. Tahap-tahap itu antara lain:

- a. Perusahaan jasa konstruksi mengajukan surat penawaran kepada panitia pelelangan proyek.
- b. Membuat dokumen penawaran yang terdiri dari jadwal umum pelaksanaan pekerjaan, analisa harga satuan mata pembayaran utama dan harga satuan dasar, daftar personil inti lapangan, daftar peralatan, daftar lampiran penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, dokumen lain yang disyaratkan dan data pelengkap.
- c. Mengikuti pelelangan yang diselenggarakan panitia pelelangan proyek.
- d. Pihak panitia pelelangan proyek akan menilai penawaran yang dilakukan masing-masing perusahaan jasa konstruksi.
- e. Hasil evaluasi ini akan menentukan salah satu perusahaan yang berhak memenangkan lelang.

- f. Pemenang lelang membuat surat perjanjian kontrak dengan pihak pemberi proyek.

B. PENYAJIAN DATA

1. Data Proyek

Salah satu proyek yang ditangani oleh PT Budi Karya Mandiri adalah proyek pembangunan Pasar Daerah di Kabupaten Jombang. Berikut ini merupakan data yang dapat disajikan oleh penulis :

Nama Proyek	: Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
Lokasi Proyek	: Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 13 bulan, terhitung tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Januari 2007
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 6 bulan, terhitung tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 1 Juli 2007
Nilai Kontrak	: Rp 33.000.000.000

Proyek pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung ini merupakan proyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang pengerjaan dan penyelesaiannya diserahkan kepada PT Budi Karya Mandiri. Dalam kontrak perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, yakni Pemerintah Kabupaten Jombang dan PT Budi Karya Mandiri, terdapat beberapa hal khusus yang jarang ditemui pada kontrak-kontrak jangka panjang lainnya. Salah satunya bahwa proyek pembangunan pasar daerah ini merupakan bentuk investasi PT Budi Karya Mandiri kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini pula menyebabkan perbedaan dalam sistem pembayarannya. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT Budi Karya Mandiri :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten

Jombang dengan PT Budi Karya Mandiri tentang Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

- 2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan yuridis pelaksanaan Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Pasal 2

POKOK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberi wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai penyandang dana dan pelaksana pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan untuk itu PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia menerima penunjukkan dan pemberian wewenang oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung ini, dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak.
- 3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan Pasar Daerah di Mojoagung ini ditetapkan selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejakdimulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

OBJEK, BENTUK, DAN PEMBIAYAAN

- 1) Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ini direncanakan dibangun di atas tanah hak Pengelola atas nama PIHAK PERTAMA yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung pada lahan seluas 50.750 m² (lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), dari lahan yang tersedia secara keseluruhan seluas 72.410 m² (tujuh puluh dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi).

2) Pembiayaan pembangunan pasar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp 33.000.000.000 (tiga puluh tiga milyar rupiah) untuk membangun dan/atau mengerjakan :

a. Bangunan Pasar Daerah, terdiri atas:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Bangunan Tipe B (8m x 60m) | 2 unit |
| 2. Bangunan Tipe B.1 (8m x 36m) | 4 unit |
| 3. Bangunan Tipe B.2 (8m x 36m) | 2 unit |
| 4. Bangunan Tipe C (10m x 34m) | 2 unit |
| 5. Bangunan Tipe C.1 (10m x 34m) | 2 unit |
| 6. Bangunan Tipe C.2 (12m x 38m) | 2 unit |
| 7. Bangunan Tipe C.3 (10m x 34m) | 6 unit |
| 8. Bangunan Tipe C.4 (10m x 34m) | 2 unit |
| 9. Bangunan Tipe C.5 (10m x 36m) | 2 unit |
| 10. Bangunan Tipe C.6 (12m x 34m) | 1 unit |
| 11. Bangunan Tipe C.7 (12m x 34m) | 1 unit |

b. Bangunan Penunjang Dan Fasilitas Umum, terdiri dari :

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Bangunan Penghubung (Kanopi) | 1 Ls |
| 2. Kantor Sub Terminal dan Shelter | 1 Bh |
| 3. Pos Jaga (2m x 2m) | 4 unit |

c. Urugan Tanah dan Utilitas, terdiri dari :

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Urugan Tanah sirtu dan Pematatan
3. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah, Sloof dan Pondasi Pagar
4. Pekerjaan Depo Sampah
5. Pekerjaan Perpipaan, Sumur Bor, Pompa, Genset dan Tandon Air
6. Pekerjaan Drainase
7. Pekerjaan Jalan dan Paving
8. Pekerjaan Pagar BRC
9. Lahan Terbuka Hijau (Rumput dan Taman)
10. Pekerjaan Listrik
11. Jembatan Bentang (6m x 9m)
12. Resapan Kawasan dan Papan Nama

Pasal 5**TATA CARA PEMBAYARAN**

- 1) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan paling lambat tahun anggaran 2007.
- 2) Penatausahaan keuangan pengembalian investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6**RENCANA ATAU GAMBAR BANGUNAN PROYEK**

- 1) Rencana Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung ini, disepakati oleh kedua belah pihak untuk disebut sebagai rencana proyek yang disusun dan dilaksanakan sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 2) Rencana Proyek sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya (RAB), rencana kerja dan syarat kerja, termasuk pula gambar perubahan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Rencana Proyek yang telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi lampiran dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Selama masa persiapan dan pelaksanaan pembangunan berhak menunjuk dan menempatkan petugas dan/atau tim teknis pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung untuk bertindak sebagai pengawas teknik atas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. Selama masa persiapan dan pelaksanaan pembangunan, berhak menuntut prestasi PIHAK KEDUA sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.

- c. Setelah pembangunan Pasar Daerah selesai, berhak untuk mengelola Pasar Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Membantu dan memberi kemudahan pada PIHAK KEDUA dalam hal pengurusan perijinan maupun pengurusan pemenuhan penyediaan sarana/prasarana lainnya seperti listrik PLN dan air bersih/PDAM atas pembiayaan PIHAK KEDUA.
 - b. Merealisasikan tahapan-tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 (lima) perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Selama masa persiapan dan pelaksanaan pembangunan, berhak memperoleh jaminan dari PIHAK PERTAMA terhadap adanya kemungkinan gugatan dan tuntutan pihak manapun yang sifatnya mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Selama masa persiapan dan pelaksanaan pembangunan, berhak untuk memperoleh kemudahan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 7 (tujuh) ayat (2) huruf a perjanjian kerjasama ini.
 - c. Setelah proyek ini dinyatakan selesai, berhak untuk memperoleh realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) perjanjian kerjasama ini.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Melaksanakan prestasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama ini, termasuk kewajiban melakukan studi kelayakan (Fisiability Study), menyusun dokumen amdal maupun pengurusan segala perijinan atas biaya sendiri.
 - b. Melakukan revisi terhadap perbaikan ats kekurangsempurnaaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas rencana proyek pembangunan pasar daerah di Kecamatan Mojoagung.

Pasal 9**KEMITRAAN**

- 1) Atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dapat diperkenankan untuk menunjuk langsung mitra kerja yang secara tegas disebutkan yaitu:
 - a. PT ETIKA PRANA sebagai konsultan perencana
 - b. CV. ASTA KENCANA sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi
 - c. CV. INDOCITRA PRATAMA ENG sebagai sub kontraktor mekanikal dan elektrikal.
- 2) Terhadap realisasi penunjukkan mitra kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk membuat kontrak kerja dengan mitra kerja yang ditunjuk.
- 3) Dalam rangka optimalisasi kinerja mitra kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk tim teknis terkait untuk melaksanakan pengawasan teknis.

Pasal 10**RELOKASI**

Pelaksanaan relokasi pedagang, dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan dapat dibantu oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11**PENGELOLAAN**

- 1) Berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat diberi kesempatan untuk :
 - a. Mengelola bekas pasar lama yang pemanfaatannya sesuai yang direncanakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Memanfaatkan sisa lahan yang belum terbangun di lokasi pasar baru sesuai dengan yang direncanakan oleh PIHAK PERTAMA termasuk pembangunan ruko.
- 2) Realisasi pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 12**SANKSI**

- 1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan dan / atau menyelesaikan proyek pembangunan pasar daerah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) perjanjian kerjasama ini, maka atas permohonan tertulis PIHAK KEDUA, dengan PIHAK PERTAMA dapat mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan waktu selama-lamanya tiga bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila setelah diberikannya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan maka PIHAK PERTAMA atau pengawas teknik yang ditunjuk dapat memberikan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu antara teguran yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Apabila terhadap teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ternyata PIHAK KEDUA tidak / atau belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyelesaikan proyek pembangunan, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak memutus perjanjian kerjasama ini tanpa ada kompensasi apapun dan berhak menunjuk pihak lain menggantikan sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban PIHAK KEDUA.
- 4) Segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian atau perbuatan hukum yang dibuat antara PIHAK KEDUA dengan pihak manapun, sepenuhnya merupakan resiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 13**ASURANSI**

- 1) Selama masa persiapan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan proyek oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka atas biaya sendiri PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengasuransikan seluruh proyek dari resiko kebakaran dan / atau kerugian lainnya yang dipandang perlu.
- 2) Apabila terjadi klaim asuransi maka PIHAK KEDUA berhak menerima uang klaim asuransi dengan hak opsi yang untuk selanjutnya harus dipergunakan

sepenuhnya untuk membangun kembali bangunan proyek yang terkena resiko kerugian yang pelaksanaannya di bawah PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

PEMELIHARAAN PROYEK

- 1) Seluruh proyek yang ada dalam kawasan pasar daerah di Kecamatan Mojoagung ini, baik bangunan inti, bangunan fasilitas umum, maupun utilitas penunjang termasuk rekening pembayaran listrik dan air bersih (PDAM), masih menjadi tanggung jawab pemeliharaan dan pembayarannya oleh PIHAK KEDUA selama jangka waktu 6 (enam) bulan tenggang masa pemeliharaan.
- 2) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, maka PIHAK KEDUA secara tertulis menyerahkan tanggung jawabnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 1) *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan / atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, sebagainya termasuk adanya kebijakan pemerintah seperti kebijakan makro ekonomi atau kebijakan suku bunga atau kebijakan di bidang moneter lainnya termasuk penetapan kenaikan atau penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* dengan disertai keterangan dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- 3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai *Force Majeure*.

- 4) Dalam terjadinya *Force Majeure* dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan oleh pihak yang terkena *Force Majeure*, maka kedua belah pihak sepakat untuk membahas pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 16

SENGKETA HUKUM

- 1) Dalam hak terjadi sengketa hukum atau perbedaan pendapat maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui panitia arbitrase yang keanggotaannya terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, serta seorang wakil dari PIHAK KETIGA yang netral yang dipilih dan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 3) Dalam hal penyelesaian melalui Panitia Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian melalui jalur hukum dengan menunjuk dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang.

Pasal 17

PENUTUP

- 1) Berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan pembangunan / pengembangan pada sisa lahan yang belum dibangun yang pelaksanaannya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri.
- 2) Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam pasal-pasal perjanjian kerjasama ini, terhadap perubahannya disepakati oleh kedua belah pihak untuk menetapkan penambahan dan / atau perubahannya dengan menuangkannya dalam perjanjian tambahan (Addendum Perjanjian) yang

merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

- 3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan kesepakatan dan tanpa adanya unsur paksaan dan dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangka 4 (empat) di atas materai Rp 6000,00.
- 4) Perjanjian kerjasama ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dari penyajian isi kontrak kerja sama di atas antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT Budi Karya Mandiri dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan proyek pembangunan pasar daerah ini, perusahaan menerapkan kontrak harga tetap. Pihak kontraktor, yakni PT Budi Karya Mandiri, setuju untuk melaksanakan semua pekerjaan proyek yang dicantumkan dalam kontrak dengan imbalan uang (harga) yang jumlahnya tetap. Hal ini berarti bahwa perusahaan menanggung semua resiko kemungkinan kenaikan biaya yang tidak dapat diduga atau diramalkan selama proyek berlangsung.

Berikut ini akan disajikan rekapitulasi biaya yang dianggarkan oleh PT Budi Karya Mandiri dalam melaksanakan proyek pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung :



No.	JENIS PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA PER UNIT	JUMLAH
1.	Bangunan Pasar Daerah				
a.	Bangunan Type A	Unit	2	1,057,991,000	2,115,982,000
b.	Bangunan Type B.1	Unit	4	542,279,000	2,169,116,000
c.	Bangunan Type B.2	Unit	2	596,337,000	1,192,674,000
d.	Bangunan Type C	Unit	2	397,243,000	794,486,000
e.	Bangunan Type C.1	Unit	2	489,758,000	979,516,000
f.	Bangunan Type C.2	Unit	2	453,683,000	907,366,000
g.	Bangunan Type C.3	Unit	6	399,583,000	2,397,498,000
h.	Bangunan Type C.4	Unit	2	489,759,000	979,518,000
i.	Bangunan Type C.5	Unit	2	408,343,000	816,686,000
j.	Bangunan Type C.6	Unit	1	634,138,000	634,138,000
k.	Bangunan Type C.7	Unit	1	625,718,000	625,718,000
					13,612,698,000
2.	Fasilitas Penunjang				
a.	Bangunan Penghubung (Canopy)				
-	Canopy 5m x 5m	Unit	1	118,864,000	118,864,000
-	Canopy 4m x 4m	Unit	4	77,565,000	310,260,000
-	Canopy B ke B.1	Unit	2	13,138,000	26,276,000
b.	Kantor Sub Terminal	Unit	1	333,859,000	333,859,000
c.	Kantor Pasar	Unit	1	302,000,000	302,000,000
d.	Pos Jaga	Unit	4	29,600,000	118,400,000
					1,209,641,000
3.	Urugan Tanah dan Utilitas	LS	1	13,678,138,000	13,678,138,000
	JUMLAH				28,500,477,000
	PPN 10%				2,850,047,700
	JUMLAH				31,350,524,700
	JUMLAH DIBULATKAN				31,350,500,000

2. Tata Cara Pembayaran

Seperti yang dipaparkan pada surat perjanjian kerja sama antara PT Budi Karya Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, tidak ada perjanjian bagaimana dan kapan tepatnya pembayaran seharusnya dilakukan. Pada surat perjanjian hanya disebutkan bahwa pembayaran harus lunas pada saat proyek tersebut selesai atau selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2007.

Pada tahun 2006 perusahaan menerima tiga kali pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Jombang, yakni pada awal pelaksanaan kontrak (sebagai uang muka proyek), pada bulan Juli, dan pada bulan Desember bersamaan dengan penyerahan tahap pertama. Perlu diketahui bahwa bangunan pasar daerah ini diserahterimakan dua kali, yakni pada bulan Desember 2006 dan ketika bangunan selesai seluruhnya yakni pada akhir Januari 2007.

Berikut ini akan disajikan jurnal umum yang dibuat perusahaan selama tahun 2006 :

a. Pencatatan saat terjadi kontrak kerjasama

Piutang Usaha	Rp 33.000.000.000	
Pendapatan ditangguhkan		Rp33.000.000.000

b. Mencatat uang muka yang diterima oleh perusahaan pada bulan Januari

Kas	Rp 5.000.000.000	
Piutang Usaha		Rp 5.000.000.000

c. Mencatat mencatat biaya untuk proyek

Proyek dalam penyelesaian	Rp 26.901.053.435	
Kas		Rp 24.901.053.435
PPN terhutang		Rp 2.000.000.000

d. Mencatat pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Jombang pada bulan Juli dan Desember 2006

Kas	Rp 17.000.000.000	
Piutang Usaha		Rp 17.000.000.000

- e. Untuk mencatat harga pokok penjualan

Biaya Proyek Rp 26.901.053.435

Proyek dalam pelaksanaan Rp 26.901.053.435

Pendapatan proyek pembangunan pasar daerah dari Pemerintah Kabupaten Jombang ini diakui seluruhnya oleh perusahaan pada akhir tahun 2006. Berikut merupakan jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor pada tahun 2006 :

- a. Untuk menutup pendapatan pada awal kontrak

Pendapatan ditangguhkan Rp 33.000.000.000

Biaya Proyek Rp 26.901.053.435

Laba Kotor Rp 6.098.946.565

- b. Untuk mengakui pendapatan pada akhir tahun 2006

Laba Kotor Rp 6.098.946.565

Biaya Proyek Rp 26.901.053.435

Pendapatan direalisasikan Rp 33.000.000.000

Berikut ini jurnal yang dicatat perusahaan pada selama bulan Januari 2007 :

- a. Mencatat penerimaan dari pemberi kerja

Kas Rp 11.000.000.000

Piutang Usaha Rp 11.000.000.000

- b. Mencatat beban proyek

Proyek dalam penyelesaian Rp 4.449.446.565

Kas Rp 3.599.398.865

PPN Terhutang Rp 850.047.700

- d. Mencatat harga pokok penjualan

Biaya Proyek Rp 4.449.446.565

Proyek dalam penyelesaian Rp 4.449.446.565

Sedangkan jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat proyek selesai adalah sebagai berikut :

Beban Proyek	Rp 4.449.446.565	
Laba Kotor (Rugi)		Rp 4.449.446.565
Pendapatan		0

Besarnya PPN yang terdapat pada jurnal umum, baik untuk tahun 2006 maupun 2007, besarnya telah ditetapkan sebelumnya sebesar 10% dari jumlah anggaran biaya pembangunan pasar daerah.

Pada tahun 2007 pendapatan proyek dari Pemerintah Kabupaten Jombang tidak diakui karena 100% atau keseluruhan pendapatan, sebesar Rp33.000.000.000 sudah diakui pada tahun 2006. Jadi pendapatan pada bulan Januari tahun 2007 dianggap tidak ada atau nol (0). Dan dari jurnal-jurnal di atas akan dapat diketahui rugi / laba proyek untuk tahun 2006 dan tahun 2007 sebagai berikut : (dalam Rupiah)

	<u>Tahun 2006</u>	<u>Tahun 2007</u>
Pendapatan proyek	33.000.000.000	0
Biaya Proyek	<u>26.901.053.435 -</u>	<u>4.449.446.565 -</u>
	6.098.946.565	(4.449.446.565)

Setelah mengetahui laba (rugi) yang diperoleh perusahaan dari proyek pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, berikut ini akan disajikan laporan keuangan, yakni neraca dan laporan laba / rugi pada tahun 2005 dan 2006. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2006 PT Budi Karya Mandiri hanya menerima kontrak proyek dari Pemerintah Kabupaten Jombang saja. Jadi pendapatan perusahaan pada tahun 2006 hanya berasal dari proyek pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung.

Tabel 4.1
PT BUDI KARYA MANDIRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2005

Keterangan	Jumlah
<u>AKTIVA</u>	
AKTIVA LANCAR :	
Kas dan Setara Kas	590,409,187
Piutang Usaha	-
Piutang Pemegang Saham	900,000,000
Jumlah Aktiva Lancar	1,490,409,187
<u>AKTIVA TIDAK LANCAR :</u>	
Aktiva Tetap :	
Harga Perolehan	3,430,437,500
Akumulasi Penyusutan	(458,061,458)
Nilai Buku	2,972,376,042
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	2,972,376,042
JUMLAH AKTIVA	4,462,785,229
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>	
<u>KEWAJIBAN LANCAR:</u>	
Biaya yang masih harus dibayar	-
Hutang Bank	194,248,630
Hutang Pajak	-
Jumlah Kewajiban Lancar	194,248,630
<u>EKUITAS :</u>	
Jumlah Ekuitas	4,268,536,599
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,462,785,229

Sumber : PT Budi Karya Mandiri

PT BUDI KARYA MANDIRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2006

Keterangan	Jumlah
<u>AKTIVA</u>	
AKTIVA LANCAR :	
Kas dan Setara Kas	1,551,928,132
Piutang Usaha	11,000,000,000
Piutang Pemegang Saham	-
Jumlah Aktiva Lancar	12,551,928,132
<u>AKTIVA TIDAK LANCAR :</u>	
Aktiva Tetap :	
Harga Perolehan	3,430,437,500
Akumulasi Penyusutan	(780,470,833)
Nilai Buku	2,649,966,667
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	2,649,966,667
JUMLAH AKTIVA	15,201,894,799
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>	
<u>KEWAJIBAN LANCAR:</u>	
Biaya yang masih harus dibayar	476,750,473
Hutang Bank	5,990,000,000
Hutang Pajak	2,400,000,000
Jumlah Kewajiban Lancar	8,866,750,473
<u>EKUITAS :</u>	
Jumlah Ekuitas	6,335,144,326
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,201,894,799

Sumber : PT Budi Karya Mandiri

Tabel 4.3
PT BUDI KARYA MANDIRI
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
TAHUN 2005
(dalam Rupiah)

Pendapatan		0
Beban Proyek :		
Biaya Pembelian Bahan	0	
Biaya Uruk Tanah	0	
Biaya Sumur Bor	0	
Biaya Upah Kerja dan Peralatan	0	
Biaya Perencanaan Konstruksi	0	
Biaya Manajemen Konstruksi	0	
Biaya Instalasi Listrik	0	
Biaya Administrasi	0	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	171.075.000	
Total Beban Proyek		(171.075.000)
Laba (Rugi) Kotor		(171.075.000)
Beban Usaha		(603.273.547)
Laba (Rugi) Kotor		(774.312.547)
Pendapatan (Beban) Lain-lain		(22.625.144)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(796.937.691)

Sumber : PT Budi Karya Mandiri

Tabel 4.4
PT BUDI KARYA MANDIRI
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
TAHUN 2006
(dalam Rupiah)

Pendapatan		33.000.000.000
Beban Proyek :		
Biaya Pembelian Bahan	13.750.906.435	
Biaya Uruk Tanah	4.202.113.000	
Biaya Sumur Bor	112.500.000	
Biaya Upah Kerja dan Peralatan	5.865.393.500	
Biaya Perencanaan Konstruksi	908.500.000	
Biaya Manajemen Konstruksi	741.000.000	
Biaya Instalasi Listrik	202.738.000	
Biaya Administrasi	880.390.000	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	237.512.500	
Total Beban Proyek		(26.901.053.435)
Laba (Rugi) Kotor		6.098.946.565
Beban Usaha		(2.348.152.466)
Laba (Rugi) Kotor		3.750.794.099
Pendapatan (Beban) Lain-lain		(1.684.186.372)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		2.066.607.727

Sumber : PT Budi Karya Mandiri

C. EVALUASI DAN INTERPRETASI DATA

Pada tahun 2006 PT Budi Karya hanya menerima satu proyek saja, yakni Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung. Oleh karena itu pendapatan yang diperoleh perusahaan hanya berasal dari proyek ini saja.

Seperti yang telah diuraikan pada kontrak kerja sama di atas, tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang kepada PT Budi Karya Mandiri tidak dicantumkan secara detail pada surat perjanjian kerja sama. Dalam surat perjanjian kerja sama tersebut hanya mencantumkan Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pembayaran atau pelunasan pada saat proyek tersebut selesai atau selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2007 berlangsung. Jadi kontrak perjanjian tersebut, jika dilihat secara sekilas, merugikan pihak kedua, yakni PT Budi Karya Mandiri.

Selain itu terdapat pula beberapa kekurangan yang dilakukan oleh PT Budi Karya Mandiri, terutama dalam hal pencatatan akuntansi yang dilakukan selama proyek Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung. Berikut evaluasi permasalahan dalam pencatatan akuntansi pada PT Budi Karya Mandiri :

- a. Jarak pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang kepada PT Budi Karya Mandiri terlalu jauh (6 bulan). Seperti diketahui bahwa pembangunan pasar daerah ini merupakan proyek yang berskala besar yang memerlukan biaya yang besar pula. Pembayaran uang muka pada bulan Januari 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,- tentu mengakibatkan perusahaan sedikit mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk proyek tersebut, sehingga pada bulan April 2006 perusahaan harus melakukan peminjaman ke bank untuk menutupi kekurangan biaya. Hal ini menyebabkan perusahaan menanggung resiko kerugian yang lebih besar.
- b. PT Budi Karya Mandiri mengakui pendapatan pada tahun 2006 sebesar Rp 33.000.000.000,- atau 100% dari kontrak proyek, padahal pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Daerah tersebut belum mencapai 100%. Hal ini dapat mengakibatkan *overstatement* pada laporan rugi / laba yang dibuat oleh perusahaan pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007 tidak lagi terdapat pengakuan pendapatan, padahal masih terdapat biaya proyek yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi

perusahaan. Selain itu pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa menggambarkan, baik prestasi kerja maupun prestasi kinerja keuangan perusahaan, pada tahun 2006 dengan baik.

- c. Tidak adanya perjanjian cara pembayaran yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Di dalam perjanjian kerja sama hanya tercantum bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang dapat melunasi pembayaran setelah proyek selesai 100 % atau selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2007. Dengan cara pembayaran seperti ini, maka perusahaan akan menghadapi resiko kerugian yang lebih besar.

Dari uraian di atas, sehubungan dengan pengakuan pendapatan yang ditetapkan oleh PT Budi Karya Mandiri maka penulis mencoba melakukan pemecahan masalah, agar diperoleh pengakuan pendapatan yang tepat dan penyajian laporan keuangan yang layak dan diterima umum. Berdasarkan teori yang ada terdapat dua pendekatan didalam menggunakan metode persentase penyelesaian, yaitu :

- a. *Cost to Cost Method* (Pendekatan Biaya)
- b. *Efforts Expended Method* (Pendekatan Biaya Dicurahkan)

Sesuai dengan metode penelitian pada Bab III dan berdasarkan data-data yang diperoleh dari perusahaan maka penulis akan menggunakan metode *Cost to cost* untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam perhitungan dengan pendekatan *Cost to Cost* ini perlu diperhatikan beberapa asumsi untuk dapat menggunakannya, yaitu :

- a. Nilai kontrak yang dipakai adalah harga kontrak yang disepakati oleh pemberi kerja.
- b. Realisasi biaya proyek tiap periode dianggap benar-benar terjadi pada periode yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan diuraikan terlebih dulu langkah-langkah pemecahan masalah :

- a. Menentukan persentase penyelesaian dengan cara membandingkan antara biaya penyelesaian yang terjadi sesungguhnya dengan total biaya penyelesaian yang direncanakan.

- b. Menghitung pendapatan proyek yang diperoleh dengan cara mengalikan persentase penyelesaian dengan nilai kontrak, serta menghitung rugi / laba dengan cara mengurangkan pendapatan yang diakui dengan realisasi biaya.
- c. Membuat jurnal proyek sesuai dengan teori yang ada.
- d. Menyajikan laporan keuangan proyek yang bersangkutan sesuai dengan teori.
- e. Menyajikan laporan keuangan perusahaan
- f. Membuat kesimpulan mengenai pengaruh pengakuan pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan metode persentase penyelesaian dengan membandingkan laporan keuangan diantara keduanya.

Berikut rangkuman data yang berkaitan dengan periode pengerjaan proyek tersebut:

	<u>Tahun 2006</u>	<u>Tahun 2007</u>
Biaya yang dikeluarkan	Rp 26.901.053.435	Rp 31.350.500.000
Estimasi biaya untuk menyelesaikan	Rp 31.350.500.000	-
Kas yang diterima	Rp 22.000.000.000	Rp 11.000.000.000

Setelah melihat penyajian di atas, maka berikut ini akan disajikan cara perhitungan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *Cost to Cost*.

	<u>Tahun 2006</u>	<u>Tahun 2007</u>
Harga Kontrak	Rp 33.000.000.000	Rp 33.000.000.000
Dikurangi :		
Biaya sampai saat ini	Rp 26.901.053.435	Rp 31.350.500.000
Estimasi biaya untuk penyelesaian	Rp 4,449,446,565	-
Estimasi biaya total	Rp 31,350,500,000	Rp 31,350,500,000
Estimasi Total Laba Kotor	Rp 1,849,500,000	Rp 1,849,500,000
Persentase Penyelesaian	85,81%	100%

Menghitung Pendapatan dan Laba Yang Diakui

a. Pendapatan dan Laba tahun 2006

85,81% x Rp 33.000.000.000 : Rp 28.317.300.000

(-) Biaya yang dikeluarkan : Rp 26.901.053.435

Labanya diakui : Rp 1.416.246.565

b. Pendapatan dan Laba tahun 2007

100% x 33,000,000,000 : Rp 33.000.000.000

(-) Pendapatan tahun 2006 : Rp 28.317.300.000

Pendapatan tahun 2007 : Rp 4.682.700.000

(-) Biaya yang dikeluarkan : Rp 4.449.446.565

Labanya diakui : Rp 232.253.435

Seperi yang telah disajikan pada kontrak kerja sama bahwa pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Jombang kepada PT Budi Karya Mandiri tidak terdapat termin-termin pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yang terpenting bahwa pembayaran telah lunas pada saat proyek selesai. Oleh karena itu jurnal umum yang berhubungan dengan pembayaran, seperti kas dan piutang usaha, sama seperti jurnal-jurnal umum sebelumnya.

Sedangkan perlakuan akuntansi untuk proyek dalam penyelesaian sedikit berbeda. Hal ini disebabkan bahwa pada akhir tahun 2006, perusahaan telah menyerahkan sebagian hasil kerjanya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Jombang dan peristiwa serah terima proyek tahap pertama ini belum dibukukan. Jadi ada baiknya jika serah terima proyek tersebut dibukukan dengan menambah akun "proyek yang diserahkan" dan berikut jurnal umumnya pada tahun 2006:

a. Pencatatan saat terjadi kontrak kerjasama

Piutang Usaha Rp 33.000.000.000

Pendapatan ditangguhkan Rp 33.000.000.000

b. Mencatat uang muka yang diterima oleh perusahaan pada bulan Januari

Kas Rp 5.000.000.000

Piutang Usaha Rp 5.000.000.000

c. Mencatat biaya untuk proyek

Proyek dalam Penyelesaian Rp 26.901.053.435

Kas Rp 24.901.053.435

PPN Terhutang Rp 2.000.000.000

d. Mencatat pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Jombang pada Bulan Juli dan Desember 2006.

Kas Rp 17.000.000.000

Piutang Usaha Rp 17.000.000.000

e. Mencatat serah terima proyek tahap pertama pada bulan Desember 2006

Proyek yang diserahkan Rp 26.901.053.435

Proyek dalam penyelesaian Rp 26.901.053.435

f. Mencatat harga pokok penjualan

Biaya Proyek Rp 26.901.053.435

Proyek yang diserahkan Rp 26.901.053.435

Sedangkan jurnal untuk bulan Januari 2007 sebagai berikut:

a. Mencatat penerimaan dari pemberi kerja

Kas Rp 11.000.000.000

Piutang Usaha Rp 11.000.000.000

b. Mencatat beban proyek

Proyek dalam penyelesaian Rp 4.449.446.565

Kas Rp 3.599.398.865

PPN Terhutang Rp 850.047.700

c. Mencatat serah terima proyek tahap kedua

Proyek yang diserahkan Rp 4.449.446.565

Proyek dalam penyelesaian Rp 4.449.446.565

d. Mencatat harga pokok penjualan

Biaya Proyek Rp 4.449.446.565

Proyek yang diserahkan Rp 4.449.446.565

Jurnal yang mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor (rugi) berbeda jumlahnya dengan perusahaan karena adanya perbedaan metode yang digunakan.

Perbedaan tersebut didasarkan pada perhitungan di atas dengan metode persentase penyelesaian.

Berikut akan disajikan ayat-ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor masing-masing tahun dan jurnal untuk mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak :

Tahun 2006

- a. Untuk menutup pendapatan pada awal tahun

Pendapatan yang ditangguhkan	Rp 28.317.300.000	
Biaya Proyek		Rp 26.901.053.435
Laba kotor		Rp 1.416.246.565

- b. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor tahun 2006

Laba Kotor	Rp 1.416.246.565	
Biaya Proyek	Rp 26.901.053.435	
Pendapatan yang direalisasikan		Rp 28.317.300.000

Tahun 2007

- a. Untuk menutup pendapatan yang ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan	Rp 4.682.700.000	
Biaya Proyek		Rp 4.449.446.565
Laba kotor		Rp 233.253.435

- b. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor

Laba Kotor	Rp 233.253.435	
Biaya Proyek	Rp 4.449.446.565	
Pendapatan yang direalisasikan		Rp 4.682.700.000

Perhitungan Laba Rugi untuk proyek pembangunan Pasar Daerah Mojoagung pada tahun 2006 dan 2007 sebagai berikut :

	<u>Tahun 2006</u>	<u>Tahun 2007</u>
Pendapatan Proyek	Rp 28.317.300.000	Rp 4.682.700.000
(-)Biaya Proyek	<u>Rp 26.901.053.435</u>	<u>Rp 4.449.446.565</u>
Rugi / Laba	Rp 1.416.246.565	Rp 233.253.435

Berikut ini akan disajikan perbandingan laporan rugi / laba untuk proyek pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung tahun 2006 dan 2007 antara metode perhitungan yang disajikan oleh perusahaan dengan metode persentase penyelesaian yang digunakan oleh penulis : (dalam Rupiah)

	Perusahaan		Persentase Penyelesaian	
	2006	2007	2006	2007
Pendapatan Proyek	33.000.000.000	-	28.317.300,000	4.682.700.000
(-) Biaya Proyek	26.901.053.435	4.449.446.565	26.901.053.435	4.449.446.565
Rugi / Laba	6.098.946.565	(4.449.446.565)	1.416.246.565	233.253.435

Data : Data Diolah

Dari penyajian dan pembahasan di atas terdapat beberapa perbedaan. Hal ini sebagai akibat dari penerapan metode pengakuan pendapatan yang berbeda antara perusahaan dengan metode yang digunakan penulis, yakni metode persentase penyelesaian. Perbedaan terjadi terutama pada laporan rugi / laba, sedangkan pada neraca tidak ada perubahan.

Pada pendapatan proyek, perusahaan pada tahun 2006 mengakui 100% atau Rp 33.000.000.000,-, sedangkan jika menggunakan metode persentase pendapatan diakui sebesar Rp 28.317.300.000,-. Jadi terdapat selisih sebesar Rp 4.682.700.000,-. Hal ini juga mengakibatkan perbedaan besarnya laba atau rugi pada perusahaan.

Berikut laporan rugi / laba perusahaan setelah menerapkan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *Cost to Cost* :

Tabel 4.5
PT BUDI KARYA MANDIRI
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
TAHUN 2006
(dalam Rupiah)

Pendapatan		28.317.300.000
Beban Proyek :		
Biaya Pembelian Bahan	13.750.906.435	
Biaya Uruk Tanah	4.202.113.000	
Biaya Sumur Bor	112.500.000	
Biaya Upah Kerja dan Peralatan	5.865.393.500	
Biaya Perencanaan Konstruksi	908.500.000	
Biaya Manajemen Konstruksi	741.000.000	
Biaya Instalasi Listrik	202.738.000	
Biaya Administrasi	880.390.000	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	237.512.500	
Total Beban Proyek		(26.901.053.435)
Laba (Rugi) Kotor		1.416.246.565
Beban Usaha		(2.348.152.466)
Laba (Rugi) Kotor		(931.905.901)
Pendapatan (Beban) Lain-lain		(1.684.186.372)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(2.616.092.273)

Data : Data Diolah

Dari penyajian data di atas, baik data yang berasal dari perusahaan maupun data yang diolah oleh penulis, ada perbedaan yakni dalam hal pengakuan pendapatan yang nantinya akan berpengaruh kepada laba yang akan diterima oleh perusahaan pada akhir tahun.

Dalam mengakui pendapatannya, perusahaan mengakui keseluruhan pendapatannya pada akhir tahun 2006 yang mengakibatkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar pada akhir tahun 2006. Sedangkan pada bulan Januari 2007, di mana kontrak telah selesai, tidak ada pendapatan dari kontrak pembangunan pasar daerah tersebut yang diakui, sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Penulis dalam mengakui pendapatan yang diterima perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *Cost to Cost*, di mana persentase penyelesaian didapat dengan membandingkan biaya penyelesaian yang terjadi sesungguhnya dengan total biaya penyelesaian yang direncanakan, kemudian mengalikannya dengan nilai kontrak. Dengan menerapkan metode persentase penyelesaian ini mengakibatkan pada tahun 2006 perusahaan mengalami kerugian. Akan tetapi pada Januari 2007 perusahaan akan memperoleh keuntungan dari proyek pembangunan pasar daerah ini karena masih ada pendapatan yang diakui pada saat kontrak selesai.

Jika melihat uraian di atas, memang hasil yang diberikan berbanding terbalik dengan laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan, dimana dengan metode sebelumnya perusahaan memperoleh laba, sedangkan dengan metode persentase penyelesaian perusahaan akan mengalami kerugian. Akan tetapi jika perusahaan menerapkan metode persentase penyelesaian, maka akan terlihat benar prestasi kerja perusahaan, di mana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan proyek tersebut sebanding dengan pendapatan yang diakui.

Berikut ini akan disajikan perbandingan jurnal untuk pengakuan pendapatan dan laba kotor serta laporan laba / rugi perusahaan pada tahun 2006 :

Tabel 4.6
Perbandingan Jurnal Untuk Mencatat Proyek Yang Diserahkan dan Harga Pokok Penjualan
(dalam Rupiah)

Perusahaan		Penulis	
Tahun 2006 :		Tahun 2006 :	
Biaya Proyek	26.901.053.435	Proyek yang diserahkan	26.901.053.435
Proyek dlm penyelesaian	26.901.053.435	Proyek dlm penyelesaian	26.901.053.435
(Harga Pokok Penjualan)		(Serahterima tahap pertama)	
		Biaya Proyek	26.901.053.435
		Proyek yg diserahkan	26.901.053.435
		(Harga Pokok Penjualan)	
Per 31 Januari 2007 :		Per 31 Januari 2007 :	
Biaya Proyek	4.449.446.565	Proyek yang diserahkan	4.449.446.565
Proyek dlm penyelesaian	4.449.446.565	Proyek dlm penyelesaian	4.449.446.565
(Harga Pokok Penjualan)		(Serahterima tahap kedua)	
		Biaya Proyek	4.449.446.565
		Proyek yg diserahkan	4.449.446.565
		(Harga Pokok Penjualan)	

Data : Data Diolah

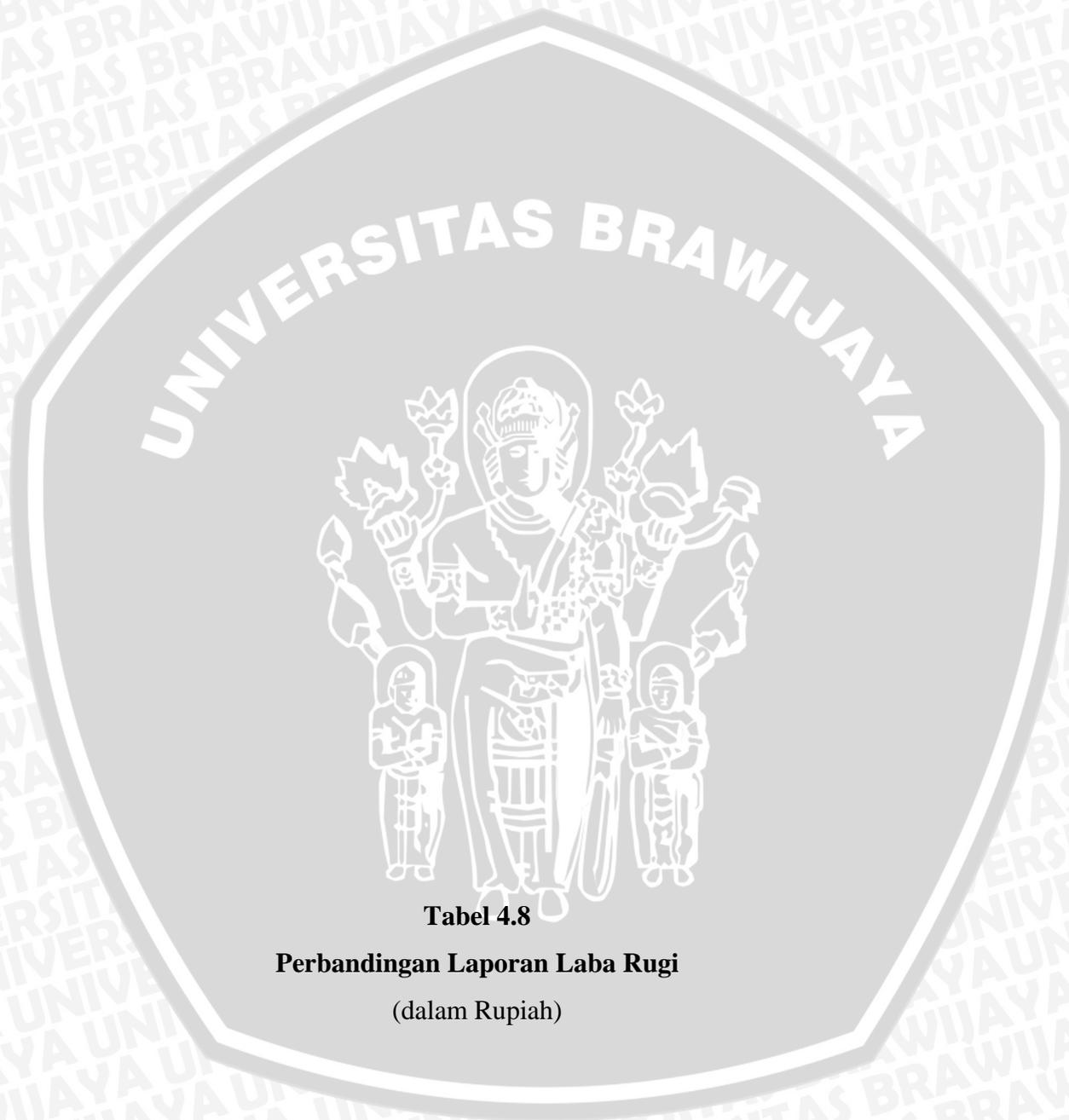
Tabel 4.7

Perbandingan Jurnal Untuk Mengakui Pendapatan dan Laba Kotor

(dalam Rupiah)

Perusahaan		Metode Persentase Penyelesaian	
Tahun 2006 :		Tahun 2006 :	
Laba Kotor	6.098.946.565	Laba Kotor	1,416,246,565
Beban Proyek	26.901.053.435	Beban proyek	26,901,053,435
Pendapatan	33.000.000.000	Pendapatan Proyek	28,317,300,000
Per 31 Januari 2007 :		Per 31 Januari 2007 :	
Beban Proyek	4.449.446.565	Laba Kotor	233,253,435
Laba Kotor (Rugi)	4.449.446.565	Beban proyek	4,449,446,565
Pendapatan	0	Pendapatan proyek	4,682,700,000

Data : Data Diolah



Tabel 4.8

Perbandingan Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Perusahaan		Metode Persentase Penyelesaian	
Pendapatan	33.000.000.000	Pendapatan	28.317.300.000
Total Beban Proyek	(26.901.053.435)	Total Beban Proyek	(26.901.053.435)
Laba (Rugi) Kotor	6.098.946.565	Laba (Rugi) Kotor	1.416.246.565
Beban Usaha	(2.348.152.466)	Beban Usaha	(2.348.152.466)
Laba (Rugi) Kotor	3.750.794.099	Laba (Rugi) Kotor	(931.905.901)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.684.186.372)	Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.648.186.372)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	2.066.607.727	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(2.616.092.273)

Data : Data Diolah

Bab V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PT Budi Karya Mandiri dalam mengakui pendapatannya, terutama pada proyek Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, adalah dengan mengakui adanya pendapatan sebesar 100% pada tahun 2006 dari nilai kontrak yang telah disepakati sebelumnya dan 0% pada tahun 2007.
2. Pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT Budi Karya Mandiri kurang tepat karena menimbulkan *overstatement* terhadap pengakuan pendapatan dan laba kotor pada periode tahun 2006 dan *understatement* pada tahun 2007. Overstatement terjadi karena pendapatan yang diakui pada tahun 2006 terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya proyek yang dikeluarkan, sedangkan understatement terjadi karena pada tahun 2007 tidak ada pendapatan proyek yang diakui yang seluruhnya telah diakui pada tahun sebelumnya dan hal ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan selama tahun 2007.
3. Penerapan metode persentase penyelesaian pada pengakuan pendapatan PT Budi Karya Mandiri didasarkan pada beberapa permasalahan yang ada, yakni:
 - a. Tidak adanya pembayaran uang muka dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini menyebabkan biaya proyek yang dikeluarkan lebih besar daripada dana yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga untuk menutupinya perusahaan mengadakan pinjaman kepada bank.
 - b. Perusahaan mengakui pendapatan pada tahun 2006 sebesar 100 %, padahal pelaksanaan proyek pembangunan tersebut belum mencapai 100%. Hal ini akan menimbulkan keuntungan pada tahun pertama dan kerugian yang cukup besar pada tahun berikutnya.
 - c. Tidak adanya perjanjian tata cara pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang kepada PT Budi Karya Mandiri. Hal ini menyiratkan bahwa Pemerintah Kabupaten sewaktu-waktu dapat melakukan pembayaran asalkan tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan. Dengan cara pembayaran seperti ini, maka perusahaan akan menghadapi resiko kerugian yang lebih besar.

Pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian dilakukan dengan cara menentukan persentase penyelesaian dengan membandingkan antara biaya penyelesaian yang terjadi sesungguhnya dengan total biaya penyelesaian yang direncanakan. Kemudian menghitung pendapatan proyek yang diperoleh dengan cara mengalikan persentase penyelesaian dengan nilai kontrak, serta menghitung laba/rugi dengan cara mengurangi pendapatan yang diakui dengan realisasi biaya.

4. Pengakuan pendapatan yang diakui terhadap proyek pembangunan Pasar Daerah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode persentase penyelesaian mengakibatkan perbedaan terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama pada laporan laba/rugi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari laba perusahaan pada tahun 2006. Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian laba pada tahun 2006 mengalami penurunan yang disebabkan pendapatan yang diakui perusahaan didapatkan dari persentase biaya yang terjadi dikalikan dengan nilai proyek keseluruhan. Akan tetapi pada saat proyek selesai, perusahaan akan memperoleh laba, dimana sebelum menggunakan metode persentase penyelesaian perusahaan mengalami kerugian.

B. SARAN

1. Dalam membuat perjanjian kerja sama, terutama dalam menangani proyek besar, ada baiknya kedua belah pihak yang bersangkutan menyebutkan lebih detail mengenai tata cara pembayaran. Dengan adanya hal ini diharapkan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Dalam mengakui pendapatan sebaiknya perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *Cost to Cost* karena pendapatan yang diakui sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, yang nantinya akan berpengaruh pada laba yang akan diperoleh perusahaan. Hal ini juga dapat menggambarkan prestasi kerja perusahaan dalam melaksanakan proyek yang sesungguhnya pada tahun bersangkutan yang tercermin pada laba yang dihasilkan dari proyek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi : Revisi III*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baridwan, Z. 1997. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta:BPFE
- Dyckman, R. Thomas, Dukes, E. Roland dan Davis, J. Charles. 2000. Alih Bahasa: Munir Ali, SE, M.B.A. *Intermediate Accounting*. Jakarta : Erlangga
- Fischer, M. Paul. 1989. *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Edisi III*. Alih Bahasa: Drs. Irwan Saragih, SE.,Akt. Jakarta: Erlangga
- Harahap, SS. 1995. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hendriksen, S. Eldon dan Van Breda, F. Michael. 2000. *Teori Akuntansi, Buku: I*. Alih Bahasa: Drs. Hugroho Widjajanto, Ak. Batam: Interaksa
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J. dan Warfield, Terry D. 1995. *Akuntansi Intermediate, Jilid: I*. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Jakarta: Binarupa Aksara
- 2002. *Akuntansi Intermediate, Jilid: III*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Maleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Marzuki. 1989. *Metodologi Riset, Edisi: IV*. Jakarta: Liberty
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugraha, P., Natan, I. Dan Stjipto, R. 1985. *Manajemen Proyek Konstruksi I*. Surabaya: PT Waskita Karya
- Singarimbun, M dan Effendy, S. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Skousen, S. 2004. *Akuntansi Intermediate, Jilid: I*. Alih Bahasa: Rika Budiarti. Jakarta: Salemba Empat
- Soeharto, Imam. 2001. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga
- Subagyo, J. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Supriyono, R. A. 1991. *Akuntansi Manajemen I: Konsep Dasar Akuntansi Manajemen dan Proses Perencanaan*. Yogyakarta: BPFE
- Suwarjono. 1986. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE

CURRICULUM VITAE

- Nama : Anita Retnaningtyas
Nomor Induk Mahasiswa : 0310323013-32
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 15 Maret 1985
Pendidikan : 1. SD Narotama I Malang Tamat Tahun 1997
2. SMP Negeri 3 Malang Tamat Tahun 2000
3. SMU Negeri 8 Malang Tamat Tahun 2003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA